



## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2024



**MAINI ASNA, SKM, M.Si**  
Kepala Dinas PPPA Dumai



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA DUMAI  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Putri Tujuh Komplek Rumah Dinas Pemerintah  
Kota Dumai

---

**KEPUTUSAN  
WALI KOTA DUMAI  
NOMOR : 10/SK/DPPPA/2023**

**T E N T A N G**  
RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2024

**WALI KOTA DUMAI**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yang berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab diperlukan peningkatan budaya kerja dan etos kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas;
- b. Bahwa untuk lebih memantapkan pelaksanaan penyusunan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan serta mewujudkan Good Governance perlu disusun dan disampaikan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota Dumai tentang Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4432);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 ), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah mengalami perubahan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pelaporan Keuangan dan Kinerja dan Instansi Pemerintah Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D );
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota

- Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;
10. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kota Dumai;
  11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai;
  12. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai ( Berita Daerah Kota Dumai tahun 2016 Nomor 23 Seri D );
  13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai tahun 2024;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2024;

##### **Pasal 1**

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2024 adalah Rencana Kerja yang akan dilaksanakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada Tahun 2024.

##### **Pasal 2**

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2024 merupakan Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sesuai tugas, pokok dan fungsi, menjamin komitmen dan konsistensi perencanaan dan program serta kegiatan sebagai landasan dalam penentuan program dan kegiatan tahunan serta acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

Pasal 3

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : D U M A I

Pada tanggal : 10 Agustus 2023

---

An. WALI KOTA DUMAI  
KEPALA,



**MAINI ASNA, SKM, M. SI**

Pembina Tk. I

NIP. 19680529 198903 2 002

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2024 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021-2026. Kedua dokumen acuan tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang diarahkan untuk mewujudkan *Visi Kota Dumai "Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman) "*.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan Rencana Kerja dan kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai melalui target rencana kerja dan pencapaian kinerja ini untuk lebih meningkatkan kinerja serta kerja sama semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

Akhirnya kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 ini dan semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Dumai, 10 Agustus 2023  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kota Dumai,



**MAINI ASNA, SKM, M.Si**  
NIP.19680529 198903 2 002

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU</b> .....	<b>6</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.....	27
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai .....	47
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	54
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	69
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI</b> .....	<b>70</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	70
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Dumai.....	73
3.3 Program dan Kegiatan .....	74
<b>BAB IV RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025</b> .....	<b>90</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>97</b>
5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian .....	97
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut.....	98
5.3 Rencana Tindak Lanjut .....	98

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Non Urusan dan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022.....	6
Tabel T-C. 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah .....	10
Tabel 2.2.1.1	Proporsi Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 .....	29
Tabel 2.2.1.2	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022.....	30
Tabel 2.2.1.3	Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022.....	31
Tabel 2.2.1.4	Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jabatan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 .....	31
Tabel 2.2.1.5	Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jabatan Struktural Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 .....	32
Tabel 2.2.1.6	Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Pangkat dan Golongan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 .....	33
Tabel T-C. 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai .....	39
Tabel 2.2.2.1	Tabel Indikator Kinerja Sasaran Strategis Beserta Target dan Realisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022.....	40
Tabel 2.2.2.2	Tabel Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022.....	41
Tabel T-C. 31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Dumai.....	55
Tabel T-C. 32	Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Dumai .....	69
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai .....	73
Tabel T-C. 33	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025.....	77
Tabel Bab IV.	Rencana Kerja Program Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	91



## DAFTAR GRAFIK

Grafik Gambar B.1	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar di Kota Dumai Periode Tahun 2018 sd 2022.....	44
Grafik Gambar B.2	Skor Pencapaian Kota Layak Anak Kota Dumai Periode Tahun 2018 sd 2022 .....	45
Grafik Gambar B.3	Skor Pencapaian Anugerah Parahta Ekapraya (Ape) Kota Dumai Periode Tahun 2020 sd 2022 .....	46

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD), adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berpedoman kepada Rencana Strategi Perangkat Daerah dan RKPD, hal ini untuk menjamin kesesuaian program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Dalam rangka penyusunan rencana kerja, perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Proses penyusunan rencana kerja meliputi : (1) Persiapan Penyusunan Rencana Kerja; (2) Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja; (3) Penyusunan Rancangan Rencana Kerja; (4) Pelaksanaan Forum/ Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja; (6) Penetapan Rencana Kerja.

Rencana Kerja memiliki keterkaitan dengan perencanaan baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan tentang :

1. Pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD.

2. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
4. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Adapun yang menjadi Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya daerah Tingkat II Dumai;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;
10. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kota Dumai;
11. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai;
12. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai;
13. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2024;

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan kebijakan, program dan kegiatan Kota Dumai di Tahun 2024.

Sedangkan tujuan adalah :

1. Menyediakan data capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada tahun 2022.
2. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam bentuk dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan Tahun 2024.
3. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2024.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2024, sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
	3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN LALU**

**2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGI PERANGKAT DAERAH**

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu disesuaikan antara target yang telah ditetapkan dengan Realisasi yang telah dicapai. Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu diharapkan dapat menjadi perbandingan untuk Rencana Kerja Tahun berjalan. Pada tahun 2022 total anggaran keseluruhan sebesar Rp. 6.832.285.231,- , dan telah terealisasi sebesar Rp. 6.501.899.676,- atau 95.16% seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL 2.1**  
**PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN NON URUSAN DAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2022**

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
<b>A.</b>	<b>NON URUSAN</b>	<b>5,857,789,681</b>	<b>5,611,923,851</b>	<b>95.80%</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>5,857,789,681</b>	<b>5,611,923,851</b>	<b>95.80%</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52,721,851	51,209,846	97.13%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,455,770,222	4,261,651,701	95.64%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8,444,000	8,444,000	100.00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	414,215,608	407,248,131	98.32%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	819,468,000	776,257,173	94.73%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107,170,000	107,113,000	99.95%
<b>B.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>974,495,550</b>	<b>889,975,825</b>	<b>91.33%</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>277,799,900</b>	<b>271,037,500</b>	<b>97.57%</b>

	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	67,267,400	66,661,600	99.10%
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	122,426,200	118,023,600	96.40%
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	88,106,300	86,352,300	98.01%
<b>2</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>438,133,950</b>	<b>368,537,950</b>	<b>84.12%</b>
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	72,100,000	71,140,000	98.67%
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	349,044,000	280,408,000	80.34%
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16,989,950	16,989,950	100.00%
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>16,898,800</b>	<b>16,570,900</b>	<b>98.06%</b>
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16,898,800	16,570,900	98.06%
<b>4</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>50,999,400</b>	<b>49,630,000</b>	<b>97.31%</b>
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	10,389,000	10,385,800	99.97%
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40,610,400	39,244,200	96.64%
<b>5</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>190,663,500</b>	<b>184,199,475</b>	<b>96.61%</b>
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	78,350,000	76,775,200	97.99%
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10,007,500	8,207,500	82.01%
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102,306,000	99,216,775	96.98%
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>6,832,285,231</b>	<b>6,501,899,676</b>	<b>95.16%</b>



Berikut ini merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai tahun 2022 serta realisasi APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023 :

- a. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, yaitu: Semua program kegiatan memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.
- b. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, yaitu : Semua program kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan baik program non urusan maupun program urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- c. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.
  - Tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran dari yang direncanakan
- d. Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan :
  - 1) Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara Kepala Dinas dan jajaran yang ada di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  - 2) Mitra kerja yang mampu menyelesaikan kewajiban secara tepat waktu dan memuaskan.
  - 3) Telah terjalinnya kerjasama yang baik antar perangkat daerah terkait
  - 4) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam hal pengaduan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program rencana strategi perangkat daerah :
  - 1) Meningkatnya kemampuan dan kapasitas SDM Aparatur, SDM pendamping dan manajer kasus

- 2) Bertambahnya sarana pendukung kelancaran tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai
  - 3) Meningkatnya partisipasi perempuan dibidang politik dan jabatan publik serta meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan perempuan dan anak
  - 4) Meningkatnya peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera
- f. Kebijakan tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :
- 1) Membangun kerjasama team work
  - 2) Melakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang sudah dilakukan, serta melakukan tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan program/kegiatan yang belum/tidak tercapai
  - 3) Merumuskan dan membuat perencanaan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program/kegiatan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja serta Pencapaian Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel T-C. 29 di bawah ini :

**TABEL T.C. 29**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN**  
**PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2022**  
**KOTA DUMAI**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	3	Indikator Kinerja program/kegiatan/sub kegiatan	4	Target kinerja capaian program (RENSTRA) Tahun 2022	5	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun (n-3) 2021	6		7		8		9	10		11
								Target Renja OPD tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja OPD tahun 2022	Target Renja OPD tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja OPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat kegiatan /sub kegiatan (Renja 2023)		Realisasi capaian program dan kegiatan/sub kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Realisasi capaian program dan kegiatan/sub kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	
1	2	3		4		5		6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
2	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
2	6	PROGRAM PERUSAHAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Presentase penjangkauan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	6	1	Perencanaan, Pengguguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah (Dokumen)	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	16 Dokumen	100%	100%
2	06	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah (Renstra dan Renja)	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	3 Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	100%	100%
2	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	100%	100%
2	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	100%	100%
2	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	100%	100%
2	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	100%	100%

Kode	Dusun/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan	Target kinerja capaian program (RENSTRA) Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (a-3) 2021	Target realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (a-2) 2022			Target program dan kegiatan /sub kegiatan (Renja 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra OPD s/d tahun 2023	
					Target Renja OPD tahun (a-2) 2022	Realisasi Renja OPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan/sub kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat capaian realisasi target Renstra ( % )
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	08 01 2.01 06	Koordinasi dan Perencanaan Laporan Capaian Kinerja dan Ibtahisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan iktahisar realisasikinerja OPD   LKJP dan LKJIP	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
2	08 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen PK, BKT dan KA	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	8 1 2.02	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase administrasi keuangan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	100%	32 Orang/bulan	32 Orang/Bulan	100%
2	8 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
2	8 01 2.03 06	Pemertahanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan pemertahanan barang milik daerah SKPD	0	0	0	0%	2 Laporan	2 Laporan	100%
2	8 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	8 01 2.05 02	Perencanaan Pakuan Dinas berserta Atribut Kelembagaannya	Jumlah Paket Pakuan Dinas beserta Atribut Kelembagaannya	68 Shel	0	0	0%	68 Paket	68 Paket	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan	Target kinerja capaian program (RENSTRA) Tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun (n-3) 2021	Target realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan /sub kegiatan (Renja 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra OPD s/d tahun 2023	
					Target Renja OPD tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja OPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan/sub kegiatan s/d tahun berjalan [2023]	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9+7+9)	11 = (10/4)
2 8 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 Orang	0	0	0	0%	1 Orang	1 Orang	100%
2 8 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	3 Orang	0	0	0	0%	1 Orang	1 Orang	100%
2 6 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 08 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%
2 08 01 2.06 02	Penyediaan Perlengkapan dan Perengkapan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (Dumas Ekspo, pawai Idul Fitri dan Idul Adha	12 bulan 100 %	12 bulan 100 %	12 bulan	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%
2 08 01 2.06 03	Penyediaan Pemeliharaan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%
2 08 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	3 Paket	3 Paket	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan	Target kinerja capaian program (RENSTRA) Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun (n-3) 2021	Target realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lain (n-2) 2022			Target program dan kegiatan /sub kegiatan (Renja 2023)	Realisasi capaian program dan kegiatan/sub kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra OPD s/d tahun 2023
					Target Renja OPD tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja OPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (8+7+9)	11 = (10/4)
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetak dan pengadaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	3 Paket	3 Paket	100%
2.08.01.2.06.06	Pengadaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan baku dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.6.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitasi kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	29 Unit	29 Unit	100%
2.8.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	6 Unit	100%	0%	0%	0%	14 Unit	14 Unit	100%
2.8.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	7 Unit	100%	0%	0%	0%	8 Unit	8 Unit	100%
2.8.1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	12 Bulan	0%	0%	0%	0%	8 Unit	8 Unit	100%
2.6.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	12 Bulan	0%	12 Bulan	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemeliharaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan	Target kinerja capaian program (RESSTRA) Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun (n-3) 2021	Target realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan /sub kegiatan (Rencana 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Resstra OPD s/d tahun 2023	
					Target Renja OPD tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja OPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan/sub kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat capaian realisasi target Resstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7-9)	11 = (10/4)
2.06.01.2.06.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	100%	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.06.01.2.06.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor, jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor, jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran, jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga sapis, jumlah penyediaan kebutuhan jasa Psikolog, jumlah penyediaan jasa petugas pendamping/ penyuluh, jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga operator komputer Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.8.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	59 Unit	59 Unit	100%
3.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perawatan Glasir atau Kendaraan Glasir Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara secara rutin / berkala dan selengkapnya administrasi kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	1 Unit	1 Unit	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja capaian program (RENSTRA) Tahun 2022	Realisasi target kinerja program dan kegiatan tahun (n-3) 2021	Target realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan /sub kegiatan (Renja 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra OPD s/d tahun 2023	
					Target Renja OPD tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja OPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan/sub kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 08 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertinaan Kendaraan Diruas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas atau lapangan yang dipelihara secara rutin / berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional dan lapangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	6 Unit	6 Unit	100%
2 08 01 2.09 06	Pemeliharaan Pemeliharaan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	8 Unit	8 Unit	100%
2 08 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	100%	0	0	0%	11 Unit	11 Unit	100%
2 08 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung/kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	10 Unit	12 Bulan	10 Unit	10 Unit	100%	11 Unit	11 Unit	100%
2 8 02	PROGRAM PERKAWASUTAMAAN GENDER DAN PEMBEDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya Persentase ARG di Kota Dumai	10%	5%	10%	10%	100%	15%	16%	100%
2 8 2 2.01	Pelaksanaan Pengurusan Gendong (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengurusan gendong (PUG) di Kelurahan	100%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 8 2 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlengkapinya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Bulan	100%	12 Bulan	%	%	1 Dokumentasi	1 Dokumentasi	100%



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan/sub kegiatan	Target kinerja capaian program (RENSTRA) Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun (n-3) 2021	Target realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lain (n-2) 2022			Target program dan kegiatan /sub kegiatan (Renja 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra OPD s/d tahun 2023	
					Target Renja OPD tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja OPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan/sub kegiatan s/d tahun kegiatan (2023)	Tingkat capaian realisasi target Renstra ( % )
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7-9)	11 = (10/4)
2 08 02 2.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Perencanaan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG diseleksi Pengarah daerah Terlaksananya pendampingan PUG termasuk PPRG tingkat Kelurahan	33 Kelurahan 100 %	83%	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100%	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	100%
2 08 02 2.01 04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya sosialisasi kebijakan pelaksanaan Program/kegiatan Gender (PUG) termasuk PPRG di Kelurahan, jejaring masyarakat, Perguruan Tinggi	2 Jejaring masyarakat, 2 Perguruan tinggi, 7 Kecamatan	7 Kecamatan	0	0	100%	20 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	100%
2 8 2 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kecamatan/Kota	Terlaksananya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi masyarakat	7 Kecamatan	7 Kecamatan	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2 08 02 2.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik dan ekonomi	7 Kecamatan	100%	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2 08 02 2.02 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen hasil sosialisasi peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	7 Kecamatan	0	0	0	0%	3 Organisasi	3 Organisasi	100%

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan	Target kinerja capaian program (RENSTRA) Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun (s-3) 2021	Target realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lain (s-2) 2022			Target program dan kegiatan /sub kegiatan (Renja 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra OPD s/d tahun 2023	
					6	7	8 = (7/6)		Realisasi capaian program dan kegiatan/sub kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat capaian realisasi target Renstra ( % )
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	2.03	Pengujian dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kowenangan Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
2	2.03	Peningkatan Kapasitas Sumbardaya Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	30 Orang 150 Orang	0%	0	0	0%	40 orang	40 orang	100%
3	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kowenangan Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	20%	10%	20%	20%	100%	30%	30%	100%
2	03	2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja capaian program (RENSTRA) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun (n-3) 2021	Target realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan /sub kegiatan (Rencana 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra OPD s/d tahun 2023	
					Target Renja OPD tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja OPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan/sub kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat capaian realisasi target Renstra ( % )
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kelelahan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kelelahan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2	03	02	Advokasi Kelangkaan dan Peningkatan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mendukung advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	7 Kecamatan	0%	0%	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	100%
2	03	03	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kelelahan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kelelahan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Layanan	40 Layanan	100%	50 Layanan	50 Layanan	100%
2	03	01	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kelelahan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah perempuan korban kelelahan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan	30 Orang	0%	0%	15 Orang	30 Orang	100%
2	03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kelelahan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi Bagi Perempuan Korban Kelelahan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Layanan	40 Layanan	100%	25 Layanan	0%	0%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan/sub kegiatan	Target kinerja capaian program (RENSTRA) Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun (n-3) 2021	Target realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan /sub kegiatan (Renja 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra OPD s/d tahun 2023	
					Target Renja OPD tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja OPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan/sub kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7-9)	11 = (10/4)
2	3	3.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	13 bulan	12 bulan	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
2	3	3.03	02 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia layanan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dalamrangkaan kabupaten/kota	20 Orang	0	0	0%	25 Orang	25 Orang	100%
2	03	2.03	04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Kei	0	0	0	50 Orang	50 Orang	100%
2	03	2.03	04 Penguatan jejaring antara lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Terselenggaranya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang	7 Kecamatan	7 Kecamatan	7 Kecamatan	95%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	03	2.03	04 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Terselenggaranya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang	70%	70%	70%	70%	80%	80%	100%
2	03	2.03	04 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Terselenggaranya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang	70%	70%	70%	70%	80%	80%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan	Target kinerja capaian program (RESTRATRA) Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/4 tahun (n-3) 2021	Target realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lain (n-2) 2022			Target program dan kegiatan /sub kegiatan (Renc 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Rencatm OPD s/4 tahun 2023	
					Target Renc OPD tahun (n-2) 2022	Realisasi Renc OPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan/sub kegiatan s/4 tahun berjalan (2023)	Tingkat capaian realisasi target Rencatm (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (8+7+9)	11 = (10/4)
2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	7 Kecamatan	7 Kecamatan	-	-	0%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewerangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga	7 Kecamatan	0%	-	-	0%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.01 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya Fasilitasi Data Terpisah Gender dan Anak	30%	38%	30%	30%	100%	35%	35%	100%
2.01 05	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelengkapan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelengkapan Data di Kota Dumai	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewerangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi anak di Kota Dumai dan anak di Kota Dumai Tersedianya data gender di Kota Dumai	1 Dokumen 1 Dokumen	100%	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan	Target kinerja capaian program (BENSTRA) Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun (n-3) 2021	Target realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan /sub kegiatan (Renja 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra OPD s/d tahun 2023	
					Target Renja OPD tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja OPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan/sub kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 08 05 2.01 02	Perwujudan dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Keberhasilan Data di Kabupaten Dumai	Tersedianya media informasi gender dan anak Tersedianya profil anak dalam keberagaman data di Kota Dumai Tersedianya profil gender dalam keberagaman data di Kota Dumai	1. Dokumen 1. Dokumen 3. Jenis	100%	1. Dokumen 3. Jenis	1. Dokumen 3. Jenis	100%	3. Dokumen	3. Dokumen	100%
2 8 6	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PIHA)</b>	<b>Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak</b>	65%	65%	750 skor	703,6 skor	93,8%	75%	75%	100%
2 8 6 3.01	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang berperan dalam pemenuhan hak anak	50	75	20 Lembaga	20 Lembaga	100%	92 Organisasi	92 Organisasi	100%
2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	a. Terselenggaranya advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak melalui PATEM (orang) b. Terselenggaranya advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak melalui pertemuan rumah anak (Pukaasari) c. Terselenggaranya advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak melalui sekolah rumah anak (askolah)	0%	100%	a. 0 b. 20 Lembaga	a. 0 b. 20 Lembaga	100%			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan	Target kinerja capaian program (RENSTRA) Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun (n-3) 2021	Target realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) 2022			Perkiraan realisasi capaian target Renstra OPD s/d tahun 2023		
					Target Renja OPD tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja OPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan /sub kegiatan (Renja 2023)	Realisasi capaian program dan kegiatan/sub kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9) 4 Organisasi	11 = (10/4) 100%
2 06 06 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemerintahan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat informasi kebijakan dan pendampingan pemerintah baik anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	12 Bulan	100%	0	0	0%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2 8 6 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	20 Forum Anak	18 Lembaga	18 Forum Anak	18 Forum Anak	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
2 8 6 2.02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Hidup Anak Melalui Forum Anak	20 Forum Anak 20 Kali	100%	18 Forum Anak	18 Forum Anak	100%	50 Orang	50 Orang	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan	Target kinerja capaian program (RESTRATRA) Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun (n-3) 2021	Target realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan /sub kegiatan (Rencana 2023)	Pecapaian realisasi capaian target Restra OPD s/d tahun 2023	
					Target Renja OPD tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja OPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan/sub kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat capaian realisasi target Restra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9+7+9)	11 = (10/4)
03	Perogram-binaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Perungkatun Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	a.Terseleenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui KIA(jarang) b.Terseleenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui bimbingan teknis PATBM, informasi layok anak,dari pusat pembelajaran keluarga (komunitas) c.Terseleenggaranya komunikasi,edukasi dan pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui sekolah rumah anak (sekolah)	50 Orang 7 Kecamatan 20 Sekolah	100%	0	0	0%	1. Dokumen	1. Dokumen	100%
2		a. Terselenggaranya verifikasi dan pemantauan PATBM (orang) b. Terselenggaranya bimtek kervenal hak anak(jarang) c. Terselenggaranya sosialisasi parenting edukasi (orang)	a.330 Orang b.40 Orang c.30 Orang	100%	a.40 Orang b. 0 c.0	a.40 Orang b. 0 c.0	100%			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan/sub kegiatan	Target kinerja capaian program (RESTR)A Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun (a-3) 2021	Target realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (a-2) 2022			Target program dan kegiatan /sub kegiatan (Rencana 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Restra OPD s/d tahun 2023	
					Target Rencana OPD tahun (a-2) 2022	Realisasi Rencana OPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan/s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat capaian realisasi target Restra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3 108 06 2.02 04	Pengkatan Jejaring antar Lembaga Penyelenggara Layanan Perlindungan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	a. Terselenggaranya rapat koordinasi gugus tugas Kota Layak Anak (kota) b. Terselenggaranya rapat koordinasi implementasi kecamatan layak anak (kecamatan) c. Terselenggaranya rapat koordinasi pelija gugus tugas ELA (haki)	a. 50 Orang b. 7 Kecamatan c. 1 Kali	100%	a. 65 Orang b. 0 c. 0	a. 65 Orang b. 0 c. 0	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2 5 7	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KIRUSUS ANAK</b>	<b>Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak</b>	40%	30%	40%	40%	100%	50%	50%	100%
2 6 7 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2 6 7 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak berenergan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2 6 7 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	7 Layanan	7 Layanan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja capaian program (RESTRATRA) Tahun 2022	Realisasi target kinerja program dan kegiatan s/d tahun (a-3) 2021	Target realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (a-2) 2022			Target program dan kegiatan /sub kegiatan (Rencana 2023)	Perbaikan realisasi capaian target Rencana OPD s/d tahun 2023	
					Target Rencana OPD tahun (a-2) 2022	Realisasi Rencana OPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan/sub kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat capaian realisasi target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3 08 07 1.02 01	Penyediaan Layanan Pergaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian masyarakat bagi anak yg memerlukan perlindungan khusus	80 Kasus	95%	21 Kasus	21 Kasus	100%	50 Orang	50 Orang	100%
2 08 07 1.02 02	Koordinasi dan Stikronisasi Pelaksanaan Pendidangan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut peradilan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	12 Bulan	85%	0	0	0%	7 Laporan	7 Laporan	100%
2 08 07 2.02 03	Perpembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) anak yang memerlukan perlindungan khusus anak kewenangan kabupaten/kota	7 Kecamatan 30 Orang	100%	0	0	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2 08 07 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyodin Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyelia Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	12 Bulan	100%	0	0	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan	Target kinerja capaian program (RENSTRA) Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun (n-3) 2021	Target realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) 2022		Target program dan kegiatan /sub kegiatan (Renja 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra OPD s/d tahun 2023		
					Target Renja OPD tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja OPD tahun 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan/sub kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapabilitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Keseluruhan Kabupaten/kota	12 Bulan	0	12 Bulan	12 Bulan	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Dumai, 10 Agustus 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK



**MAIRI ASNA, SKM, M. SI**  
NIP. 6680529 198903 2 002

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

### **2.2.1 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai**

Peraturan Wali Kota Dumai No. 78 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa jajaran structural dan jajaran fungsional dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut:

- 1. Kepala**
- 2. Sekretariat**, terdiri dari:
  - a. Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 3. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga**, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- 4. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak**, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- 5. Bidang Perlindungan Hak Perempuan**, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- 6. Bidang Data Informasi Gender dan Anak**, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- 7. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak**, terdiri dari:
  - Kepala Unit Pelaksana Teknis.
  - Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
- 8. Jabatan Fungsional dan atau Jabatan Pelaksana**

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat menjadi UPT PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan

khusus, dan masalah lainnya. UPT PPA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Fungsi UPT PPA adalah menyelenggarakan layanan :

- a. Pengaduan masyarakat
- b. Penjangkauan korban
- c. Pengelolaan kasus
- d. Penampungan sementara
- e. Mediasi dan
- f. Pendampingan korban

UPT PPA merupakan UPT generik yang dalam prinsip pembentukannya berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis. Kebijakan pembentukan UPT PPA sebagai penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan UPT PPA. Pembentukan UPT PPA Kota Dumai ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang yang diperlihatkan dalam tabel di bawah ini :

**TABEL 2.2.1.1**  
**PROPORSI JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN**  
**STATUS KEPEGAWAIAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022**

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin				Jumlah	%
		Laki-laki	%	Perempuan	%		
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	1 orang	5,56	32 orang	62,75	33 orang	47,83
2.	Tenaga Kerja Perjanjian Kontrak (TKPK)	17 orang	94,44	19 orang	37,25	36 orang	52,17
TOTAL		18 orang	100,00	51 orang	100,00	69 orang	100,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022

Dari data di atas menunjukkan bahwa proporsi pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai didominasi oleh tenaga kerja dengan perjanjian kontrak (TKPK) sebanyak 36 orang dari jumlah seluruh pegawai yaitu 69 orang atau 52,17%. Tenaga Kerja Perjanjian Kontrak (TKPK) terdiri dari tenaga psikolog 1 orang, tenaga pendamping/ penyuluh 12 orang, tenaga administrator 11 orang, tenaga kebersihan 4 orang, tenaga keamanan 6 orang, dan tenaga supir 2 orang.

Adapun proporsi jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**TABEL 2.2.1.2**  
**PROPORSI JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN KELOMPOK UMUR**  
**DAN JENIS KELAMIN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022**

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin				Jumlah	%
		Laki-laki	%	Perempuan	%		
1.	20 s/d 30 tahun	7	38,89	15	29,41	22	31,88
2.	≥ 30 s/d 40 tahun	6	33,33	8	15,69	14	20,29
3.	≥ 40 s/d 50 tahun	3	16,67	17	33,33	20	28,99
4.	≥ 50 s/d 65 tahun	2	11,11	11	21,57	13	18,84
TOTAL		18	100,00	51	100,00	69	100,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 terbanyak berada pada kelompok umur antara 20 s/d 30 tahun yaitu sebanyak 22 orang atau 31,88%, dan kelompok umur terkecil berada pada usia ≥ 50 s/d 65 tahun sebanyak 13 orang atau 18,84%. Dari seluruh kelompok umur tersebut didominasi oleh pegawai perempuan sebanyak 51 orang dari jumlah seluruh pegawai yang ada yaitu 69 orang atau sebesar 73,91%. Melihat dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata pegawai yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 berada pada kelompok usia produktif. Hal ini dapat menjadi factor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

Adapun komposisi Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada Tahun 2022 sebanyak 33 ( tiga puluh tiga ) orang yang dibagi berdasarkan :

1. Tingkat Pendidikan

Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**TABEL 2.2.1.3**  
**JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase	Keterangan
1.	Strata II	6 Orang	18,18	
2.	Strata I	24 Orang	72,73	
3.	Diploma III	3 Orang	9,09	
Jumlah		33 Orang	100,00	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022

Data dari tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 memiliki pendidikan Strata I sebanyak 24 orang atau 72,73% dan tingkat pendidikan terendah adalah Diploma III sebanyak 3 orang atau 9,09%.

## 2. Berdasarkan Jabatan

Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan jabatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL 2.2.1.4**  
**JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN JABATAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022**

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
I.	Jabatan Struktural	1 Orang	8 Orang	9 Orang	27,27
II.	Jabatan Fungsional Tertentu (Penyetaraan)	0 Orang	14 Orang	14 Orang	42,42
III.	Jabatan Fungsional Umum	0 Orang	10 Orang	10 Orang	30,30
Total		1 Orang	32 Orang	33 Orang	100,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022



Data pada tabel di atas menggambarkan bahwa Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 yang memegang jabatan baik pada jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu didominasi oleh kaum perempuan yaitu sebanyak 32 orang atau 96,97%.

Berikut disajikan juga data jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan jabatan structural pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 seperti yang terdapat pada tabel 2.2.1.5 di bawah ini :

**TABEL 2.2.1.5**  
**JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022**

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
I.	Jabatan Struktural :			
a.	Esselon II b	0	1 Orang	1 Orang
b.	Esselon III a	0	1 Orang	1 Orang
c.	Esselon III b	1 Orang	3 Orang	4 Orang
d.	Esselon IV a	0	2 Orang	2 Orang
e.	Esselon IV b	0	1 Orang	1 Orang
	Total	1 Orang	8 Orang	9 Orang

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022

### 3. Pangkat dan Golongan

Data jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan pangkat dan golongan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.2.1.6 di bawah ini :

**TABEL 2.2.1.6**  
**JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT PANGKAT DAN**  
**GOLONGAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022**

No	Jabatan	Golongan Ruang	Jumlah	%
I.	Pembina Tk. I	IV/b	3	9,09
II.	Pembina	IV/a	5	15,15
III.	Penata Tingkat I	III/d	15	45,46
IV.	Penata	III/c	4	12,12
V.	Penata Muda Tingkat I	III/b	5	15,15
VI.	Penata Muda	III/a	1	3,03
<b>J U M L A H</b>			<b>33 Orang</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 terbanyak berada pada pangkat Penata Tingkat I dengan golongan ruang III/d sebanyak 15 orang atau 45,46%.

Indikator kinerja Dinas PPPA Kota Dumai merujuk pada Bab VIII Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026. Adapun indikator kinerja Dinas PPPA Kota Dumai Tahun 2022 sesuai RPJMD 2021 – 2026 sebagai berikut :

**A. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar.**

Keberhasilan indikator kinerja tersebut didukung oleh terlaksananya program :

1. Program perlindungan perempuan yang terdiri dari:
  - a. Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan lingkup daerah kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:
    - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap

perempuan kewenangan kabupaten/ kota dengan target 3 dokumen

- b. Kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/ kota.. dengan target 40 layanan dengan sub kegiatan :

- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/ kota dengan target 40 layanan

- c. Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:

- Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu terselenggaranya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui satuan tugas perlindungan perempuan dan satuan tugas tindak pidana perdagangan orang dengan target 7 kecamatan dan terselenggaranya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui satuan tugas tindak pidana perdagangan orang dengan target 7 kecamatan.

2. Program perlindungan khusus anak terdiri dari:

- a. Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:

- Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan

terhadap anak kewenangan kabupaten/ kota dengan target 3 dokumen.

- b. Kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:
  - Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu jumlah pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan target 21 kasus.
- c. Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:
  - Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu jumlah dokumen hasil koordinasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota dengan target 5 dokumen.

#### **B. Skor pencapaian kota layak anak**

Keberhasilan indikator kinerja tersebut didukung oleh terlaksananya program :

1. Program pemenuhan hak anak terdiri dari:
  - a. Kegiatan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:
    - Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota dengan indikator keluaran yaitu terselenggaranya penguatan informasi layak anak (ILA) dengan target 25 orang dan

terselenggaranya lembaga yang ramah anak dengan target 20 lembaga.

- b. Kegiatan penguatan dan pengembangan penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota dengan sub kegiatan:
  - Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota dengan indikator keluaran yaitu terselenggaranya pelayanan pusat pembelajaran keluarga dengan target 15 kali dan terselenggaranya peningkatan kualitas hidup anak melalui forum anak dengan target 18 forum anak.
  - Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota dengan indikator keluaran yaitu terselenggaranya replikasi dan pembinaan PATBM dengan target 40 orang.
  - Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota dengan indikator keluaran yaitu terselenggaranya rapat koordinasi gugus tugas kota layak anak dengan target 65 orang dan terselenggaranya rapat pencapaian implementasi kecamatan layak anak dengan target 7 kecamatan

### **C. Skor pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)**

Keberhasilan indikator kinerja tersebut didukung oleh terlaksananya program :

1. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan terdiri dari:
  - a. Kegiatan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota dengan sub kegiatan:
    - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota dengan indikator keluaran yaitu terlaksananya koordinasi dan

- sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/ kota dengan target 12 bulan.
- Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan indicator keluaran yaitu persentase pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG diseluruh perangkat daerah dengan target 100%, serta terlaksananya pendampingan PUG termasuk PPRG tingkat kelurahan dengan target 7 kelurahan.
- b. Kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:
- Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi dengan indicator keluaran yaitu terlaksananya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik dan ekonomi dengan target 7 kecamatan.
- c. Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:
- Pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota dengan indicator keluaran yaitu terlaksananya pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan target 2 kegiatan.
2. Program pengelolaan sistem data gender dan anak terdiri dari:
- a. Kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:
- Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/ kota dengan indicator keluaran yaitu tersedianya data informasi anak di kota dumai dengan target 1 dokumen.
  - Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/ kota dengan indicator keluaran yaitu tersedianya media

informasi gender dan anak dengan target 1 jenis media, tersusunnya profil anak dalam kelembagaan data di kota Dumai dengan target 1 dokumen, serta tersusunnya profil gender dalam kelembagaan data di Kota Dumai dengan target 1 dokumen.

Hasil analisis kinerja Pelayanan SKPD disajikan dalam tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PPPA Kota Dumai seperti terdapat di bawah ini :

**Tabel T-C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kota Dumai**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisa
				2022 (thn n-2)	2023 (thn n-1)	2024 (tan n)	2025 (thn n+1)	2022 (thn n-2)	2023 (thn n-1)	2024 (tan n)	2025 (thn n+1)	2024 (tan n)	2025 (thn n+1)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar			95	95	95	95	95	95	95	95	95			
2	Skor Pencapaian Kota Layak Anak (KLA)		SKOR PENCAPAIAN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE)	700	750	800	850	703,5	750	800	850				
3	Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)			3187	3862	3870	4000	3862,5	3862	3870	4000				

Dumai, 10 Agustus 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK



**MAINI ASNA, SKM, M. SI**  
NIP. 19680529 198903 2 002



## 2.2.2 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**TABEL 2.2.2.1**  
**TABEL INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS BESERTA TARGET**  
**DAN REALISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standart	%	95	100	105,3
		Skor pencapaian kota layak anak	Skor	700	703.5	100,5
		Skor pencapaian anugerah parahita ekapraya (APE)	Skor	3187	3862.5	121,2

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian semua indikator kinerja sasaran strategis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 sudah mencapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan atau dengan kata lain kinerja yang dihasilkan termasuk dalam kategori sangat baik.

Pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL 2.2.2.2**  
**TABEL PENGUKURAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022**

No	Indikator	Capaian 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 Terhadap Renstra 2026 (%)
			Target	Realisasi %	Realisasi %		
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standart	91	95	100	105,3	95	105,3
2	Skor pencapaian kota layak anak	650	700	703.5	100,5	900	78,2
3	Skor pencapaian anugerah parahita ekapraya (APE)	2515	3187	3862.5	121,2	4300	89,8

Dari tabel pengukuran kinerja SKPD tahun 2022 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

**A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

- a. Indikator Kinerja Sasaran : Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar.

Dari laporan yang tercatat pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Dumai tahun 2022, terdapat 21 korban kekerasan pada perempuan dan 114 adalah korban kekerasan pada anak, sehingga total keseluruhan korban kekerasan pada perempuan dan anak sebanyak 135 korban. Keseluruhan korban di atas telah mendapat penanganan pengaduan sesuai standar atau sebesar 100% dari 95% target yang ditetapkan pada tahun 2022. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja untuk indikator tersebut sangat baik.

- b. Indikator Kinerja Sasaran : Skor pencapaian kota layak anak

Pada tahun 2022 penilaian kota layak anak untuk Kota Dumai telah memperoleh skor 703.5 dari target skor 700 atau sebesar 100,5%. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja untuk indikator tersebut termasuk dalam kategori sangat baik.

- c. Skor pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

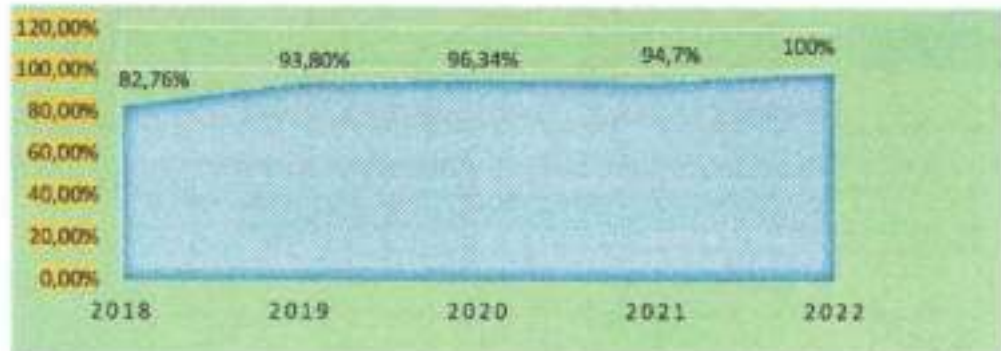
Target pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kota Dumai pada tahun 2022 dengan skor 3187. Pada Tahun 2000 Kota Dumai telah mendapat penghargaan APE dengan predikat Utama dengan skor 3862.5. Tahun 2021 dan 2022 pelaksanaan penilaian APE tidak dilaksanakan sehingga skor pencapaian APE Kota Dumai masih berada pada skor 3862.5 atau sebesar 121,2% dari skor yang sudah ditargetkan pada tahun 2022 yaitu 3187. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja untuk indikator tersebut sudah melebihi target yang diharapkan dengan kata lain bahwa indikator tersebut termasuk dalam kategori sangat baik.

**B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (2022) dengan tahun lalu (2021)**

- a. Indikator Kinerja Sasaran: Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar.

Pada tahun 2021 cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar sebesar 94,7% dari target 91% yang telah ditetapkan tahun 2021, dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 100%, dimana jumlah korban kekerasan perempuan di Kota Dumai pada tahun 2022 tercatat sebanyak 21 orang dan korban kekerasan pada anak sebanyak 114 orang. Dengan demikian total korban kekerasan pada perempuan dan anak pada tahun 2022 sebanyak 135 orang dan jumlah korban yang telah mendapat penanganan pengaduan sesuai standar sebanyak 135 orang atau 100%. Hal ini bermakna bahwa cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar di Kota Dumai pada tahun 2022 telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 95%. Jika dibandingkan dengan target tahun lalu maka capaian Kota Dumai Tahun 2022 untuk indikator tersebut sebesar 109.9%. Berikut disajikan data cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar periode Tahun 2018 s/d Tahun 2022 seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini.

**GAMBAR B.1**  
**CAKUPAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAAN**  
**YANG MENDAPAT PENANGANAN PENGADUAN OLEH**  
**PETUGAS TERLATIH DI DALAM UNIT PELAYANAN**  
**TERPADU SESUAI STANDAR DI KOTA DUMAI**  
**PERIODE TAHUN 2018 S/D 2022**



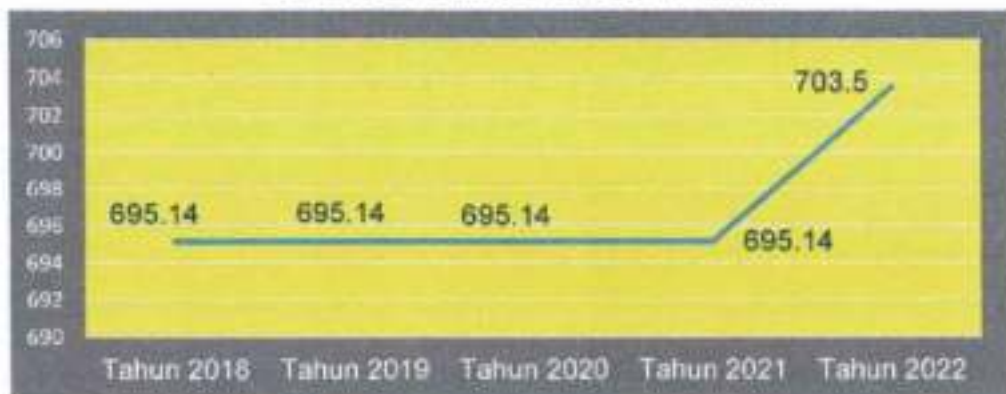
Sumber :Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022

Dari grafik di atas menunjukkan adanya peningkatan selama 5 tahun berturut-turut terhadap capaian indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar. Hal ini menggambarkan tentang kualitas pelayanan terhadap penanganan atau tindak lanjut kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Dumai dimana semua kasus kekerasan yang dilaporkan ke UPT PPA Kota Dumai telah ditindaklanjuti atau telah mendapat penanganan sesuai standar.

b. Indikator Kinerja Sasaran : Skor pencapaian kota layak anak

Pada tahun 2021 skor pencapaian kota layak anak untuk Kota Dumai sebesar 695,14 dari target 650 dan pada tahun 2022 Kota Dumai telah mendapat skor 703,5 dari skor 700 yang ditargetkan pada tahun 2022 atau sebesar 100,5% dengan kata lain telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan target tahun lalu maka capaian Kota Dumai tahun 2022 sebesar 108,2%. Berikut disajikan realisasi skor pencapaian kota layak anak periode 2018 s/d 2022 pada gambar di bawah ini:

**GAMBAR B.2**  
**SKOR PENCAPAIAN KOTA LAYAK ANAK KOTA DUMAI**  
**PERIODE TAHUN 2018 sd 2022**



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022

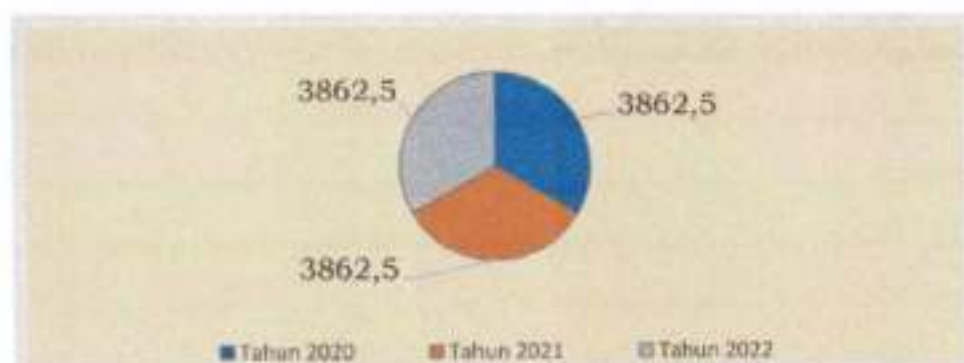
Dari grafik di atas terlihat bahwa selama 4 tahun berturut-turut Kota Dumai telah berhasil meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak dengan skor 695,14 atau dengan predikat Madya, dan meningkat skor yang diraih pada tahun 2022 menjadi 703,5 dengan predikat Nindya. Pencapaian indikator tersebut telah melebihi dari target yang ditentukan pada tahun ini dengan skor 700 atau capaian sebesar 100,5% (melebihi target). Adapun penilaian Kota Layak Anak terbagi atas 4 predikat yaitu (1) Pratama dengan range skor 500-600, (2) Madya dengan range skor 600-700, (3) Nindya dengan range skor 700-800 dan (4) Utama dengan range skor 800-900, serta Kota Layak Anak dengan range skor 900-1000.

- c. Indikator Kinerja Sasaran : Skor pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

Target pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kota Dumai pada tahun 2022 dengan skor 3187. Pada Tahun 2000 Kota Dumai telah mendapat penghargaan APE dengan predikat Utama dengan skor 3862.5. Tahun 2021 dan 2022 pelaksanaan penilaian APE tidak dilaksanakan sehingga skor pencapaian APE Kota Dumai Tahun 2021 masih berada pada skor 3862.5 dari skor 2512 yang ditargetkan pada Tahun 2021. Untuk Tahun 2022 penilaian Anugerah Parahita Ekapraya juga belum terlaksana sehingga capaian untuk Kota

Dumai masih tetap pada skor 3862.5 dari skor 3187 yang ditargetkan pada Tahun 2022 atau capaian sebesar 121.2%. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja untuk indikator tersebut sudah melebihi target yang diharapkan dengan kata lain bahwa indikator tersebut termasuk dalam kategori sangat baik. Dan jika dibandingkan dengan target tahun lalu maka realisasi capaian Kota Dumai Tahun 2022 untuk indikator ini sebesar 153,8%. Berikut disajikan data realisasi skor pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kota Dumai periode Tahun 2020 s/d 2022 seperti tampak pada gambar di bawah ini:

**GAMBAR B.3**  
**SKOR PENCAPAIAN ANUGERAH PARAHTA EKAPRAYA (APE) KOTA DUMAI PERIODE TAHUN 2020 sd 2022**



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022

**C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (2022) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

- a. Indikator Kinerja Sasaran : Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar

Realisasi kinerja untuk indikator sasaran tersebut adalah 100% dari target yang ditetapkan yaitu 95% atau sebesar 105,3% (telah melebihi target) jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang berarti capaian indikator tersebut termasuk dalam kategori sangat baik.

- b. Indikator Kinerja Sasaran : Skor pencapaian kota layak anak

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka realisasi kinerja pencapaian kota layak anak tahun 2022 memperoleh skor 703,5 dari target yang ditetapkan yaitu 700 atau sebesar 100,5%. Dengan demikian capaian indikator ini sudah melebihi target.

- c. Indikator Kinerja Sasaran : Skor pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

Target pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kota Dumai pada tahun 2022 dengan skor 3187, dan realisasi capaian Kota Dumai telah mendapat penghargaan APE dengan predikat Utama dengan skor 3862.5 atau sebesar 121,2% (telah melebihi target).

### **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

1. Tingkat kinerja pelayanan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan hal kritis yang terkait dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar.

Pada tahun 2021 cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar sebesar 94,7% dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 100%, dimana jumlah korban kekerasan perempuan di Kota Dumai pada tahun 2022 tercatat sebanyak 21 orang dan korban kekerasan pada anak sebanyak 114 orang. Dengan demikian total korban kekerasan pada perempuan dan anak pada tahun 2022 sebanyak 135 orang dan jumlah korban yang telah mendapat penanganan pengaduan sesuai standar sebanyak 135 orang atau 100%. Hal ini bermakna bahwa



cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar di Kota Dumai pada tahun 2022 telah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 95%. Dalam kurun waktu 5 tahun berturut-turut terjadi peningkatan terhadap capaian indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar. Hal ini menggambarkan tentang kualitas pelayanan terhadap penanganan atau tindak lanjut kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Dumai dimana semua kasus kekerasan yang dilaporkan ke UPT PPA Kota Dumai telah ditindaklanjuti atau telah mendapat penanganan sesuai standar.

b. Skor pencapaian Kota Layak Anak (KLA)

Pada tahun 2021 skor pencapaian kota layak anak untuk kota Dumai sebesar 695,14 dari target 650 dan pada tahun 2022 Kota Dumai telah mendapat skor 703,5 dari skor 700 yang ditargetkan pada tahun 2022 atau sebesar 100,5% dengan kata lain telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2022. Selama 4 tahun berturut-turut Kota Dumai telah berhasil meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak dengan skor 695,14 atau dengan predikat Madya, dan meningkat skor yang diraih pada tahun 2022 menjadi 703,5 dengan predikat Nindya. Pencapaian indicator tersebut telah melebihi dari target yang ditentukan pada tahun 2022 dengan skor 700 atau capaian sebesar 100,5% (melebihi target). Adapun penilaian Kota Layak Anak terbagi atas 4 predikat yaitu (1) Pratama dengan range skor 500-600, (2) Madya dengan range skor 600-700, (3) Nindya dengan range skor 700-800 dan (4) Utama dengan range skor 800-900, serta Kota Layak Anak dengan range skor 900-1000.

c. Skor pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

Target pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kota Dumai pada tahun 2022 dengan skor 3187. Pada Tahun 2000 Kota Dumai telah mendapat penghargaan APE dengan predikat Utama dengan skor 3862.5. Tahun 2021 dan 2022 pelaksanaan

penilaian APE tidak dilaksanakan sehingga skor pencapaian APE Kota Dumai masih berada pada skor 3862.5 atau sebesar 100 % dari skor yang sudah ditargetkan pada tahun 2022 yaitu 3187. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja untuk indikator tersebut sudah melebihi target yang diharapkan dengan kata lain bahwa indikator tersebut termasuk dalam kategori sangat baik.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - a. Belum optimalnya kualitas pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
  - b. Belum optimalnya pelaksanaan program kegiatan pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seperti kegiatan pemberdayaan perempuan, pencegahan serta penanganan kasus – kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dalam pelaksanaannya membutuhkan tenaga – tenaga ahli dan professional dibidangnya seperti Psikolog, Psikiater, serta tenaga ahli lainnya.
  - c. Belum optimalnya penyelenggaraan hak-hak anak sebagaimana ketentuan yang terkandung dalam UU perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014
  - d. Belum optimalnya pendataan gender dan anak di Kota Dumai yang disebabkan karena belum semua Perangkat Daerah terkait menggunakan system data terpisah.

Sedangkan hambatan yang dihadapi yaitu minimnya anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sehingga belum semua program – program kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada pencapaian Visi Kota Dumai yaitu ***“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman).”***

3. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Wali Kota Dumai, terhadap Capaian Program Nasional/ Internasional

Unsur Visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjiwa diri melayu, yang mengandung makna bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Hal ini disadari karena manusia sebagai objek dan subjek dalam pembangunan yang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam memacu pelaksanaan pembangunan nasional dan berdaya saing global. Melalui Misi tersebut kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai harus dilaksanakan sejalan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai setiap tahunnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai mendukung pencapaian Misi ke -2 Pemerintah Kota Dumai yaitu ***“Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas dan Berjiwa Diri Melayu.”***

Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai dengan sasaran yaitu meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas PPPA

#### a. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas PPPA Kota Dumai pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- 2) Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- 3) Pengungkapan kasus-kasus kekerasan termasuk TPPO terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
- 4) Adanya kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan, dan menjamin kelangsungan hidup dalam pemenuhan hak anak.

b. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan kesetaraan dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJPN, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Riau, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- 2) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 mengamanatkan sinkronisasi sasaran antara Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Kabuapten /Kota sehingga memudahkan pencapaian target Nasional maupun target Pemerintah Daerah dalam pembangunan responsif gender.
- 3) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) memberikan kesempatan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga PBB dan atau lembaga Donor dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- 4) Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang

Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's).

- 5) Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus perempuan dan anak.
  - 6) Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
  - 7) Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. Formulasi Isu-Isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis untuk ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan.

Adapun rekomendasi dan strategis dilakukan dalam merumuskan program dan kegiatan :

- a. Meningkatkan kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah, meningkatkan partisipasi perempuan untuk menjadi anggota legislatif, mengadvokasi pimpinan Partai Politik untuk menempatkan perempuan sebagai calon legislatif, fasilitasi pembentukan *gender champion*, pemberian pelatihan keterampilan bantuan alat bagi kelompok rentan, meningkatkan kapasitas perencanaan dalam Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender, meningkatkan cakupan Anggaran Responsif Gender dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan memperkuat kelembagaan Pengarusutamaan Gender serta pemanfaatan data terpilah.
- b. Memperkuat kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha

dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui :

- 1) Penguatan regulasi dalam penanganan kasus termasuk penegakan hukum yang berkeadilan,
  - 2) Koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah,
  - 3) Peningkatan pemahaman Pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang,
  - 4) Pemulihan korban reintegrasi sosial,
  - 5) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan penanganan korban,
  - 6) Fasilitasi penyediaan bantuan hukum bagi yang membutuhkan.
- c. Mempercepat capaian peringkat Kota Layak Anak melalui :
- 1) Pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak,
  - 2) Penguatan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pencapaian Kota Layak Anak .
  - 3) Peningkatan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
  - 4) Advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
  - 5) Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data gender dan anak dalam pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan di Kota Dumai.
- d. Meningkatkan perlindungan anak berkebutuhan khusus melalui harmonisasi berbagai kebijakan perlindungan

khusus anak, memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di Kota Dumai untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak, menguatkan kapasitas anak berkebutuhan khusus, menyediakan sarana dan prasarana penunjang, serta memperkuat keberdayaan anak berkebutuhan khusus agar setara dengan anak-anak lainnya.

- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender melalui workshop perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang, pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender, mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil Pengarusutamaan Gender di tingkat kota, memperkuat lembaga/ jejaring Pengarusutamaan Gender di Kota Dumai untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data gender dan anak.
- f. Meningkatkan kinerja aparaturnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan regulasi dan perbaikan layanan penunjang tugas dan fungsi.

#### **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan atas program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024, maka hasil review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijelaskan dalam tabel T-C.31 berikut ini :

**TABEL T-C-31**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2024**  
**KOTA DUMAI**

No	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Dumai			6,506,333,521	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Dumai			8.074.753.804	
	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Kota Dumai	Persentase peninjauan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	6.097.756.652	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Kota Dumai	Persentase peninjauan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	6.097.756.652	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah (dokumen)	16 Dokumen	47.354.720	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah (dokumen)	13 dokumen	47.354.720	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	3 Dokumen	12.399.920	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	3 Dokumen	12.399.920	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.887.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.887.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	4.479.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	4.479.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.028.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.028.800	
	Koordinasi dan Perubahan DPA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.008.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.008.800	



No	Program/ Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Kota Dumai	Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	9,880,500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Kota Dumai	Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	9,880,500	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	7,670,600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	7,670,600	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100%	4,330,873,396	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100%	4,330,873,396	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	32 Org/ Bulan	4,322,873,396	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	32 Org/ Bulan	4,322,873,396	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Dumai	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 Laporan	8,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Dumai	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 Laporan	8,000,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah laporan kegiatan administrasi barang milik daerah	2 Laporan	8,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah laporan kegiatan administrasi barang milik daerah	2 Laporan	8,000,000	
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kota Dumai	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	2 Laporan	8,000,000	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kota Dumai	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	2 Laporan	8,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100%	326,159,572	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100%	419,103,844	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan, kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	5,590,300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	5,590,300	

No	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	74,058,548	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	125,000,000	(12)
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	9,999,680	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	25,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	29,997,500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	56,000,000	
	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Kota Dumai	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	3 Paket	34,999,798	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Kota Dumai	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	3 Paket	34,999,798	
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 dokumen	7,738,000	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 dokumen	7,738,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	163,785,746	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	163,785,746	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	29 Unit	320,762,600	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	320,762,600	
	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kota Dumai	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 Unit	125,208,000	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kota Dumai	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 Unit	125,208,000	
	Pengadaan mebel	Kota Dumai	Jumlah paket mebel yang disediakan (Unit)	7 Unit	20,000,000	Pengadaan mebel	Kota Dumai	Jumlah paket mebel yang disediakan (Unit)	7 Unit	20,000,000	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	35,554,600	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	35,554,600	

No	Program/ Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	140,000,000	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	140,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai	Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4 Laporan	847,399,000	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai	Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	847,469,674	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	174,000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	174,000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	110,450,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	110,450,000	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	9,775,000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	9,835,674	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	727,000,000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	727,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	59 Unit	125,196,518	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	125,196,518	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kota Dumai	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	38,530,000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kota Dumai	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	38,530,000	

No	Program/ Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perincian kendaraan dinas operasional atau lapangan.	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan pertanyaannya	5 Unit	68.221.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perincian kendaraan dinas operasional atau lapangan.	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan pertanyaannya	5 Unit	68.221.000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Dumai	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 Unit	5.680.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Dumai	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 Unit	5.680.000	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara atau di rehabilitasi	1 Unit	6.055.518	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Dumai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara atau di rehabilitasi	1 Unit	6.055.518	
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara atau di rehabilitasi	12 unit	6.710.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara atau di rehabilitasi	12 unit	6.710.000	
	<b>PROGRAM PENGARUSTAMBAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Persentase ARG di Kota Dumai</b>	<b>30%</b>	<b>308.804.300</b>	<b>PROGRAM PENGARUSTAMBAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Persentase ARG di Kota Dumai</b>	<b>30%</b>	<b>613.449.500</b>	
	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemertintah Kewenangan Kabupaten / Kota</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Persentase pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota</b>	<b>100%</b>	<b>74.657.300</b>	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemertintah Kewenangan Kabupaten / Kota</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Persentase pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota</b>	<b>100%</b>	<b>204.887.300</b>	
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	12.656.100	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	89.900.600	

No	Program/ Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Dumai	Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan Perarusutamaan Gender (PUG) termasuk perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Perangkat Daerah	12.044.400	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Dumai	Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan Perarusutamaan Gender (PUG) termasuk perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Perangkat Daerah	65.000.000	
	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan Perarusutamaan Gender (PUG) termasuk perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Perangkat Daerah	49.956.700	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan Perarusutamaan Gender (PUG) termasuk perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Perangkat Daerah	49.956.700	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	1 Dokumen	13.884.500	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	1 Dokumen	108.662.200	
	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, sosial dan ekonomi	Kota Dumai	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.322.300	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kota Dumai	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	103.000.000	

No	Program/ Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/ Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kota Dumai	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapatkan advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	1 Organisasi	3.562.200	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dari politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kota Dumai	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapatkan advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	1 Organisasi	3.562.200	
	Pengujian dan pengembangan Lembaga penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 Kegiatan	120.262.500	Pengujian dan pengembangan Lembaga penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 Kegiatan	300.000.000	
	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Kota Dumai	Jumlah sumber daya manusia lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kabupaten/Kota yang mendapatkan peningkatan kapasitas	150 Orang	60.262.600	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Kota Dumai	Jumlah sumber daya manusia lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kabupaten/Kota yang mendapatkan peningkatan kapasitas	150 Orang	150.000.000	
	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Kota Dumai	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	1 Dokumen	60.000.000	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Kota Dumai	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	1 Dokumen	150.000.000	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Kota Dumai	<b>Meningkatnya perlindungan bagi perempuan</b>	<b>40%</b>	<b>43.858.800</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Kota Dumai	<b>Meningkatnya perlindungan bagi perempuan</b>	<b>40%</b>	<b>430.000.000</b>	
	Pencapaian kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah dokumen hasil kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah kabupaten/kota	3 Dokumen	11.860.000	Pencapaian kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah kabupaten/kota	Kota Dumai	Jumlah dokumen hasil kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah kabupaten/kota	3 Dokumen	120.000.000	

No	Program/ Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kegiatan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan terhadp daerah/kota kabupaten/kota	Kota Dumai	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan terhadp daerah/kota kabupaten/kota	1 Dokumen	1,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan terhadp daerah/kota kabupaten/kota	Kota Dumai	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan terhadp daerah/kota kabupaten/kota	1 Dokumen	65,000,000	
	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Kota Dumai	Jumlah Peringkat Daerah Yang mendapatkan Advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	7 Peringkat Daerah	10,860,000	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Kota Dumai	Jumlah Peringkat Daerah Yang mendapatkan Advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	7 Peringkat Daerah	55,000,000	
	Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi Perempuan korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Tersedianya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi	55 Layanan	10,998,800	Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi Perempuan korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Tersedianya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi	55 Layanan	105,000,000	
	Penyediaan layanan pelayanan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Kota Dumai	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan	12 Orang	10,518,800	Penyediaan layanan pelayanan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Kota Dumai	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan	12 Orang	55,000,000	

No	Program/ Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Perempuan/Kota Kabupaten/Kota	13 Kota Dumai	14 Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Meneruskan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Perempuan/Kota Kabupaten/Kota (Layanan)	15 55 Layanan	16 0	17 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Perempuan/Kota Kabupaten/Kota	18 Kota Dumai	19 Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Meneruskan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Perempuan/Kota Kabupaten/Kota (Layanan)	20 55 Layanan	21 50.000.000	22 111
	Pengadaan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan perlindungan Pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23 Kota Dumai	24 Jumlah dokumen hasil penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan pemberdayaan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	25 4 Dokumen	26 21.000.000	27 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan perlindungan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28 Kota Dumai	29 Jumlah dokumen hasil penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan pemberdayaan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	30 4 Dokumen	31 195.000.000	
	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan perempuan bagi perempuan korban kekerasan perempuan/Kota Kabupaten/Kota	32 Kota Dumai	33 Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Perempuan Korban Kekerasan Perempuan/Kota Kabupaten/Kota Yang mendapat Peningkatan Kapasitas	34 1 orang	35 1.000.000	36 Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan perempuan bagi perempuan korban kekerasan perempuan/Kota Kabupaten/Kota	37 Kota Dumai	38 Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Perempuan Korban Kekerasan Perempuan/Kota Kabupaten/Kota Yang mendapat Peningkatan Kapasitas	39 1 orang	40 80.000.000	
	Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat kondisi darurat/korban kekerasan perempuan/Kota Kabupaten/Kota	41 Kota Dumai	42 Jumlah perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten/kota yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan spesifik (Orang)	43 15 Orang	44 10.000.000	45 Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat kondisi khusus kewenangan kabupaten/kota	46 Kota Dumai	47 Jumlah perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten/kota yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan spesifik (Orang)	48 15 Orang	49 45.000.000	
	Penguatan jejaring antara lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan perempuan/Kota Kabupaten/Kota	50 Kota Dumai	51 Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antara lembaga pelayanan perlindungan perempuan perempuan/Kota Kabupaten/Kota	52 2 Dokumen	53 10.000.000	54 Penguatan jejaring antara lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan perempuan/Kota Kabupaten/Kota	55 Kota Dumai	56 Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antara lembaga pelayanan perlindungan perempuan perempuan/Kota Kabupaten/Kota	57 2 Dokumen	58 70.000.000	



No	Program/ Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	PROGRAM PERINGKATAN KUALITAS KELUARGA	(3) Kota Dumai	(4) Meningkatkan kualitas keluarga di Kota Dumai	(5) 90%	(6) 10,136,400	(7) PROGRAM PERINGKATAN KUALITAS	(8) Kota Dumai	(9) Meningkatkan kualitas keluarga di Kota Dumai	(10) 90%	(11) 94,957,100	(12)
	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah/ kota	Kota Dumai	Jumlah dokumen hasil kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah/ kota	2 Dokumen	10,136,400	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah/ kota	Kota Dumai	Jumlah dokumen hasil kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah/ kota	2 Dokumen	94,957,100	
	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/ kota	Kota Dumai	Jumlah laporan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/ kota	1 Laporan	10,136,400	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/ kota	Kota Dumai	Jumlah laporan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/ kota	1 Laporan	54,957,100	
	PROGRAM PENGELOLA SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kota Dumai	Meningkatnya pemanfaatan data terpadu gender dan anak	40%	71,000,155	PROGRAM PENGELOLA SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kota Dumai	Meningkatnya pemanfaatan data terpadu gender dan anak	40%	201,000,000	
	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah/ kota	Kota Dumai	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di Kota Dumai	6 Dokumen	71,000,155	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah/ kota	Kota Dumai	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data terpadu gender dan anak dalam kelembagaan data di Kota Dumai	6 Dokumen	201,000,000	
	Penyediaan data gender dan anak dikewenangan Kabupaten/ kota	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten Kota yang Tersedia	3 Dokumen	35,404,300	Penyediaan data gender dan anak dikewenangan Kabupaten/ kota	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten Kota yang Tersedia	3 Dokumen	100,000,000	
	Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data dikewenangan kabupaten/ kota	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten / Kota	3 Dokumen	35,595,855	Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data dikewenangan kabupaten/ kota	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten / Kota	3 Dokumen	101,000,000	

No	Program/ Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PEMERUSAH HAK ANAK (PIHA)	Kota Dumai	Meningkatnya capaian Kota Layak Anak (%)	80%	106.601,418	PROGRAM PEMERUSAH HAK ANAK (PIHA)	Kota Dumai	Meningkatnya capaian Kota Layak Anak (%)	80%	465.379,232	
	Pelaksanaan PIHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha	Kota Dumai	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media, dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	100 Organisasi	36.613,218	Pelaksanaan PIHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha	Kota Dumai	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media, dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	100 Organisasi	120.391,732	
	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	Kota Dumai	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	12 Organisasi	25.679,000	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	Kota Dumai	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	12 Organisasi	60.392,900	
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemenuhan hak anak	Kota Dumai	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemenuhan hak anak	1 Dokumen	10.934,216	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemenuhan hak anak	Kota Dumai	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemenuhan hak anak	1 Dokumen	59.998,832	
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Kota Dumai	Jumlah dokumen hasil penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	5 Dokumen	69.988,200	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Kota Dumai	Jumlah dokumen hasil penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	5 Dokumen	344.987,500	

No	Program/ Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Kota Dumai	Jumlah anak yang mendapatkan layanan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	18.992.500	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Kota Dumai	Jumlah anak yang mendapatkan layanan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	94.992.500	(2)
	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemerintah hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Kota Dumai	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemerintah hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35.285.000	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemerintah hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Kota Dumai	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemerintah hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	
	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Kota Dumai	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota (dokumen)	2 Dokumen	13.709.700	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Dumai	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota (dokumen)	2 Dokumen	95.995.000	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN MUSUH ANAK</b>		<b>Meningkatnya perlindungan khusus anak</b>	<b>60%</b>	<b>89.166.742</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN MUSUH ANAK</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Meningkatnya perlindungan khusus anak</b>	<b>60%</b>	<b>222.217.400</b>	
	Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Dumai	Tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	7 Layanan	21.050.000	Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Dumai	Tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	7 Layanan	100.217.400	

No	Program/ Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2) Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah/kabupaten/kota	(3) Kota Dumai	(4) Jumlah AMPK yang mendapat layanan pengaduan	(5) 50 Orang	(6) 20.000.000	(7) Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah/kabupaten/kota	(8) Kota Dumai	(9) Jumlah AMPK yang mendapat layanan pengaduan	(10) 50 Orang	(11) 90.000.000	(12) -
	Koordinasi Pelaksanaan layanan AMPK	Kota Dumai	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	10 Orang	1.000.000	Koordinasi Pelaksanaan layanan AMPK	Kota Dumai	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	10 Orang	10.217.400	
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah/kabupaten/kota	Kota Dumai	Jumlah dokumen hasil penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah/kabupaten/kota	7 Dokumen	38.136.742	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah/kabupaten/kota	Kota Dumai	Jumlah dokumen hasil penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah/kabupaten/kota	7 Dokumen	122.000.000	
	Penggiatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah/kabupaten/kota	Kota Dumai	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1 Kegiatan	17.084.442	Penggiatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah/kabupaten/kota	Kota Dumai	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1 Kegiatan	45.000.000	
	Peringatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan pengaduan bagi AMPK tingkat daerah/kabupaten/kota	Kota Dumai	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikasi Perlindungan dan Pengaduan AMPK	25 Orang	10.217.400	Peringatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan pengaduan bagi AMPK tingkat daerah/kabupaten/kota	Kota Dumai	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikasi Perlindungan dan Pengaduan AMPK	25 Orang	37.000.000	

No	Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting	
11	Pengembangan KIE (koordinasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	39 Kota Dumai	49 Jumlah KIE Perindungan khusus anak	51 1 Dokumen	61 10,834,900	71 Pengembangan KIE (koordinasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	81 Kota Dumai	91 Jumlah KIE Perindungan khusus anak	109 1 Dokumen	111 40,000,000	121	
<b>TOTAL</b>					<b>6,505,333,521</b>	<b>TOTAL</b>					<b>8,074,753,884</b>	

Dumai, 10 Agustus 2023  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK KOTA DUMAI

  
**MADI ASWA, SKM, M.Si**  
NIP. 19680529 198503 2 002

## 2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan publik, maupun didasarkan hasil dari pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang RKPD.

Maka hasil penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan berdasarkan usulan dari unit bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dijelaskan dalam tabel T-C. 32 berikut ini:

**Tabel T-C.32**  
**Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2024**

Nama Perangkat daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

Dumai, 10 Agustus 2023  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak Kota Dumai



MAINI ASNA, SKM, M. Si  
NIP. 19680529 198903 2 002

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

**3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2021-2024 terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagai berikut :

1. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mencakup: a) penguatan kebijakan dan regulasi, b) percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), c) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha; d) peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan; dan e) peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat.
2. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mencakup: a) penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi; b) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTP/KTA) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); c) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyelenggara pemerintahan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTP/KTA) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); d) penguatan kelembagaan

perlindungan perempuan dari tindak kekerasan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyedia layanan, koordinasi antar unit penyedia layanan, penguatan data dan informasi, serta pengawasan; e) pengembangan sistem data terpadu Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTP/KTA) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); f) pengembangan sistem layanan terpadu penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTP/KTA) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); g) penguatan jejaring dan kerja sama antara pemerintah (pusat dan daerah), komunitas, media massa, dunia usaha dan lembaga bantuan hukum; dan h) pengembangan inovasi dalam upaya pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTP/KTA) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

3. Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya, mencakup: a) penguatan regulasi dan penegakkan hukum yang proporsional terhadap kepentingan terbaik anak; b) penguatan efektivitas kelembagaan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyedia layanan, koordinasi, sistem data dan informasi, serta fungsi pembinaan dan pengawasan; c) peningkatan pemahaman tentang perlindungan anak bagi para pemangku kepentingan, masyarakat, keluarga, dan anak; d) penguatan jejaring antara pemerintah dengan komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat; e) peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya; f) penguatan upaya pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, termasuk isu pekerja anak, dan penelantaran pada anak; g) penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; h) penguatan pengasuhan di lingkungan keluarga dan pengasuhan sementara di institusi lainnya; i) peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus,



dan; j) peningkatan layanan dan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Sasaran nasional yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda dengan indikator nasional yang harus dicapai yaitu:

1. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
2. Proporsi perempuan usia 20-24 yang menikah < 18 tahun;
3. Prevalensi anak 13-17 yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%);
4. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
6. TPAK Perempuan; dan
7. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 di 12 bulan terakhir.

Berdasarkan pasal 258 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi "Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target", Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yang merupakan bagian dari perangkat daerah pemerintah Kota Dumai yang memiliki urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada arah kebijakan nasional dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Agar sinkronisasi dan harmonisasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi/ Kabupaten/ Kota dapat terwujud maka diperlukan adanya penyalarsan kegiatan prioritas nasional yang didukung oleh Kementerian/ Lembaga yang bersumber dari APBN dengan kegiatan pendukung dari daerah yang bersumber dari APBD.

**3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA DUMAI**

**Tabel 3.2**

**TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan dan sasaran	Satuan	Target setiap tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Skor pencapaian kota layak anak (KLA)	Skor	700	750	800	850	900
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu sesuai standart	%	95	95	95	95	95
			Skor pencapaian Anugrah Parahita Ekapraya (APE)	Skor	3187	3862	3870	4000	4300

### 1. Tujuan

Tujuan yang akan ditempuh dalam lima tahun kedepan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah : Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai.

### 2. Sasaran

Sasaran yang akan ditempuh oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam lima tahun kedepan adalah: "Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan".

### 3. Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian pelayanan konseling, mediasi dan pendampingan kepada Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan
- b. Peningkatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan perempuan dan anak
- c. Mewujudkan Kota Dumai sebagai Kota Layak Anak

## 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

### 1) PROGRAM

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBD.

Ada 6 (Enam) program yang direncanakan oleh Dinas PPPA Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Perlindungan Perempuan
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Program Perlindungan Hak Anak (PHA)
6. Program Perlindungan Khusus Anak

## 2) KEGIATAN

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya, berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

Ada 18 (delapan belas) kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi keuangan perangkat daerah
3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
4. Administrasi umum perangkat daerah
5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
7. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/ kota
8. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, social, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/ kota
9. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota
10. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/ kota

11. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/ kota
12. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/ kota
13. Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah kabupaten/ kota
14. Pelembagaan pemenuhan hak anak (PHA) pada Lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota
15. Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/ kota
16. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/ kota
17. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/ kota
18. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota.

Berikut disajikan rumusan rencana program kegiatan dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 pada tabel T.C 3.3 di bawah ini:

**TABEL T-C.33**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**  
**TABUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025**

Kode	Struktur/ Bidang Organisasi/ Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Target Capaian Kinerja				Catatan Penjelasan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Page Informatif (Rp.)			
		Capaian Program	Indikator sub kegiatan	Head Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Materi Sub Kegiatan		Materi Kegiatan	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target				
						Program	Sub Kegiatan									
	URUSAN PEMERINTAHAN WALID YANG TIDAK BERIKHTAN DENGAN PELAYANAN JAMAH															
	URUSAN PEMERINTAHAN BINAHO PEMERINTAHAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
	PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
	Pelayanan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
2.08.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen perencanaan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja penunjang daerah	Kota Dumai	100 %	3 Dokumen	10 Dokumen	Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Jumlah dokumen perencanaan penunjang Daerah	3 Dokumen				9.285.966.807	
2.08.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Perencanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja penunjang daerah	Kota Dumai	100 %	2 Dokumen	16 Dokumen	Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen				6.770.050	
2.08.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perencanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja penunjang daerah	Kota Dumai	100 %	2 Dokumen	16 Dokumen	Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen				5.150.850	
2.08.01.004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen SKPD	Perencanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja penunjang daerah	Kota Dumai	100 %	1 Dokumen	16 Dokumen	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Jumlah dokumen SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen SKPD	1 Dokumen				4.653.120	
2.08.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan LRA-SKPD	Perencanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen perubahan LRA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan LRA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja penunjang daerah	Kota Dumai	100 %	1 Dokumen	16 Dokumen	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Jumlah dokumen perubahan LRA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan LRA-SKPD	1 Dokumen				3.460.120	

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Berkas Tahun 2024			Prediksi Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Indikator sub kegiatan	Berkas Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Cantaa Pening	Target Capaian Kinerja		
						Program	Melunas Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tidak Ular	Target	
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyelenggaraan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan penyempit utasana penentian diarah kabupaten/kota	Jumlah laporan tahunan kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan tahunan kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	16. Diskusikan	Kota Dumai	100 %	3 Laporan	16. Diskusikan	3 Laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan tahunan kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	11,360,000
2.08.01.2.01.0007	Dukungan Kinerja Perangkat Daerah	Penerbitan penyempit utasana penentian diarah kabupaten/kota	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	16. Diskusikan	Kota Dumai	100 %	1 Laporan	16. Diskusikan	1 Laporan	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	8,821,100
<b>2.08.01.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Penerbitan penyempit utasana penentian diarah kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN</b>	<b>100%</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>100 %</b>	<b>12 Org/ Bulun</b>	<b>100%</b>	<b>12 Org/ Bulun</b>	<b>Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN</b>	<b>12 Org/ Bulun</b>	<b>4,980,904,200</b>
2.08.01.2.01.0008	Koordinasi dan Penyelenggaraan Laporan Keuangan AMK Tahun SKPD	Penerbitan penyempit utasana penentian diarah kabupaten/kota	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	100%	Kota Dumai	100 %	2 Laporan	100%	2 Laporan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 Laporan	9,200,000
<b>2.08.01.2</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Penerbitan penyempit utasana penentian diarah kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah laporan penentian barang milik daerah pada SKPD</b>	<b>100 %</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>100 %</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>Jumlah laporan penentian barang milik daerah pada SKPD</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>9,200,000</b>
2.08.01.2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah											418,100,844
												4,980,904,200

Kode	Uraian/ Bidang (urusan/ Program/ Kegiatan) / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Problema Maja Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Indikator sub kegiatan	Basis Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Realisasi (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
						Program	Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Yakut Dasar	TARGET
2.08.01.2.06.000.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagiunit Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagiunit Kantor yang diserahkan	100 %	Kota Dumai	100 %	1 Paket	100 %	3,290,300	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagiunit Kantor yang diserahkan	1 Paket	6,028,945
2.08.01.2.06.000.2	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Perlengkapan Kantor yang diserahkan	100 %	Kota Dumai	100 %	1 Paket	100 %	125,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Perlengkapan Kantor yang diserahkan	1 Paket	143,750,000
2.08.01.2.06.000.3	Penyediaan Perantara Tugas	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Perantara Tugas yang diserahkan	100 %	Kota Dumai	100 %	1 Paket	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Perantara Tugas yang diserahkan	1 Paket	28,750,000
2.08.01.2.06.000.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Sumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang diserahkan	100 %	Kota Dumai	100 %	3 Paket	100 %	56,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang diserahkan	3 Paket	64,400,000
2.08.01.2.06.000.5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah paket barang cetak dan pengiriman yang diserahkan	100 %	Kota Dumai	100 %	3 Paket	100 %	84,999,798	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Jumlah paket barang cetak dan pengiriman yang diserahkan	3 Paket	90,349,758
2.08.01.2.06.000.6	Penyediaan Bahan Baku dan Bahan Perantara/Perdagangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perantara/Perdagangan yang diserahkan	100 %	Kota Dumai	100 %	1 dokumen	100 %	7,728,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perantara/Perdagangan yang diserahkan	1 dokumen	8,087,400
2.08.01.2.06.000.9	Penyediaan Surat Koordinasi dan Laporan SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Surat Koordinasi SKPD	100 %	Kota Dumai	100 %	1 Laporan	100 %	160,785,746	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Koordinasi dan Surat Koordinasi SKPD	1 Laporan	188,353,608
2.08.01.2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah								320,763,600				348,876,990



		Rencana Tahun 2024				Prinsipnya Maju Bersama Tahun 2025						
Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Kategori Kegiatan	Materi Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Kebijakan Dana/ Paga Informatif (Rp.)		
		Capaian Program	Indikator sub kegiatan	Hasil Kegiatan			Progres	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tingkat	
2.08.01.2.07.000.1	Pengadaan Sarana dan Peralatan Dinas atau Kebutuhan Dinas Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah unit pembelian persediaan dinas atau Kebutuhan Dinas Lainnya yang disediakan	100% Ditutupi	Jumlah pengadaan barang milik Daerah	100% Ditutupi	1 Unit	29 Unit	1 Unit	Jumlah unit pembelian persediaan dinas atau Kebutuhan Dinas Lainnya yang disediakan	1 Unit	143.590.300
2.08.01.2.07.000.2	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah paket mebel yang disediakan	100% Ditutupi	Jumlah pengadaan barang milik Daerah	100% Ditutupi	7 Unit	29 Unit	7 Unit	Jumlah paket mebel yang disediakan	7 Unit	23.000.000
2.08.01.2.07.000.6	Pengadaan Sarana dan Peralatan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Unit pembelian dan Mebel Lainnya yang disediakan	100% Ditutupi	Jumlah pengadaan barang milik Daerah	100% Ditutupi	7 Unit	29 Unit	7 Unit	Jumlah Unit pembelian dan Mebel Lainnya yang disediakan	7 Unit	40.887.700
2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Unit Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	100% Ditutupi	Jumlah pengadaan barang milik Daerah	100% Ditutupi	1 Unit	29 Unit	1 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	101.000.000
<b>2.08.01.2.1</b>	<b>Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Menurut</b>	<b>100% Ditutupi</b>	<b>Tersebutnya laporan penyelidikan urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100% Ditutupi</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Menurut</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>974.378.625</b>
2.08.01.2.08.000.1	Pengadaan Jasa Saran Menurut	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Menurut	100% Ditutupi	Tersebutnya laporan penyelidikan urusan pemerintahan daerah	100% Ditutupi	1 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Menurut	1 Laporan	280.000
2.08.01.2.08.000.2	Pengadaan Jasa Komunikasi, Multimedia, Sinyal dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Komunikasi, Sinyal dan Listrik yang disediakan	100% Ditutupi	Tersebutnya laporan penyelidikan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100% Ditutupi	1 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Komunikasi, Sinyal dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	1.27.017.000
2.08.01.2.08.000.3	Pengadaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Perbaikan dan Perbaikan Kantor yang disediakan	100% Ditutupi	Tersebutnya laporan penyelidikan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100% Ditutupi	1 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Perbaikan dan Perbaikan Kantor yang disediakan	1 Laporan	11.311.623

Kode	Uraian / Bidang (Urutan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prediksi Mula Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Indikator sub kegiatan	Hasil Kegiatan	Program		Target Capaian Kinerja		Pagu Realisasi (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebijakan Dana/ Page Indikatif (Rp.)
							Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tidak Urae	Target	
2 08 01 2 09 000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan dan Uang Kante	Penertata penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan Utama Kantor yang diselesaikan	Terselenggaranya layanan penyelidikan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Dumai	100 %	1 Laporan	4 Laporan	777,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan Utama Kantor yang diselesaikan	800,000,000	
2 08 01 2 1	<b>Pembayaran Herang MIRIK Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>125,196,018</b>				<b>143,074,006</b>	
2 08 01 2 09 000 1	Penyediaan Jasa Penyelidikan, Biaya Penyelidikan dan Pajak Kontribusi Perancangan Dinas atau Kontribusi Dinas Jabatan	Penertata penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah kendaraan perancangan Dinas atau Kontribusi Dinas Jabatan yang dipeliharakan dan dibayarkan pajaknya	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Dumai	100 %	1 Unit	50 Unit	30,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 Unit	Jumlah kendaraan perancangan Dinas atau Kontribusi Dinas Jabatan yang dipeliharakan dan dibayarkan pajaknya	40,000,000	
2 08 01 2 09 000 2	Penyediaan Jasa Penyelidikan, Biaya Penyelidikan, Pajak, dan Perizinan Kontribusi Dinas Operasional atau Lapangan	Penertata penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipeliharakan dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Dumai	100 %	1 Unit	50 Unit	68,221,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 Unit	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipeliharakan dan dibayarkan pajak dan perizinannya	78,404,100	
2 08 01 2 09 000 4	Penyelidikan Penyelidikan dan Modal Lainnya	Penertata penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah perantara dan mesin industri yang dipeliharakan	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Dumai	100 %	8 Unit	59 Unit	5,680,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	8 Unit	Jumlah perantara dan mesin industri yang dipeliharakan	6,522,000	
2 08 01 2 09 000 5	Penyelidikan, Biaya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penertata penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipeliharakan atau direhabilitasi	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Dumai	100 %	1 Unit	59 Unit	6,055,218	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipeliharakan atau direhabilitasi	6,062,846	
2 08 01 2 09 000 1	Penyelidikan, Biaya Saluran dan Perawatan Perekang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penertata penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Santai Saluran dan Perawatan Perekang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipeliharakan atau direhabilitasi	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Dumai	100 %	1,2 Unit	59 Unit	6,710,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1,2 Unit	Jumlah Saluran dan Perawatan Perekang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipeliharakan atau direhabilitasi	7,710,000	
2 08 02	<b>PROGRAM PENGARUSTAMBAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>								<b>613,449,500</b>				<b>700,466,920</b>	

Kode	Uraian/ Bidang Tugas/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Pembinaan Mitra Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Indikator sub kegiatan	Realisasi Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Sumber Data	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja			
						Program	Kolaborasi Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Totok Ular	Target	Kebijakan Dana/ Page Indikator (Rp.)	
2.06.02.3	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemberintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Perencanaan ARG di Kota Dumai	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan PUG pada Pengarusutamaan Gender (PUG) Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perencanaan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	25%	1 Dokumen	100%	Dana Transfer Uraian - Data Hasil		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	335.620.208 103.420.150	
2.06.02.3	Melaksanakan Kelengkapan dan Peningkatan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Perencanaan ARG di Kota Dumai	Jumlah Perangko daerah yang mengilahi sebagai pelaksanaan dan pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk PPRG	Perencanaan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	25%	1K Perangko Daerah	100%	Dana Transfer Uraian - Data Hasil		Jumlah Perangko daerah yang mengilahi sebagai pelaksanaan pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk perencanaan perangkoif gender (PPRG) Kecamatan Kabupaten/Kota	1K Perangko Daerah	71.750.000	
2.06.02.4	Sosialisasi Kelengkapan Pelaksanaan PUG termasuk PPSG	Perencanaan ARG di Kota Dumai	Jumlah Perangko daerah yang mengilahi sosialisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk PPSG	Perencanaan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	20%	37 Perangko Daerah	100%	Dana Transfer Uraian - Data Hasil		Jumlah Perangko daerah yang mengilahi sosialisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk perencanaan perangkoif gender (PPSG) Kecamatan Kabupaten/Kota	37 Perangko Daerah	37.420.203	
2.06.02.3	Pembudayaan Perempaan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota												108.662.300	124.846.850

Kode	Garis/ Bidang Rencana/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Prinsipnya Mula Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Indikator sub kegiatan	Realisasi Kegiatan	Lokasi Desain Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Sumber Dana	Cefitas Peningkat	Target Capaian Kinerja	
						Program	Hasil Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolak Ular	Tujuan
2.08.02.2.02.000.1	Seminar/ Pengabdian Masyarakat/ Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Perencanaan APT di Kota Dumai	Jumlah dokumen hasil analisis partisipasi masyarakat di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kegiatan perencanaan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi pemerintahan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	20%	1 Dokumen	1 Dokumen	Dana Transfer Lain-lain - Dana Bagi Hasil	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil analisis partisipasi masyarakat di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kabupaten/Kota	1.20.750.000
2.08.02.2.02.000.2	Adwaker Kelurahan dan Kecamatan Partisipasi Masyarakat dan Elementer	Perencanaan APT di Kota Dumai	Jumlah organisasi masyarakat yang menyelenggarakan advokasi dan partisipasi masyarakat di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kegiatan perencanaan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi pemerintahan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	20%	1 Organisasi	1 Dokumen	Dana Transfer Lain-lain - Dana Bagi Hasil	1 Organisasi	Jumlah organisasi masyarakat yang menyelenggarakan advokasi dan partisipasi masyarakat di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kabupaten/Kota	4.096.500
2.08.03.2	Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pembedayaan Perempuan	Perencanaan APT di Kota Dumai	Jumlah wadah daya pemenuhan layanan pemberdayaan perempuan kesetaraan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan	Terbentuknya kegiatan layanan pemberdayaan perempuan	Kota Dumai	20%	150 Orang	1 Lembaga	Dana Transfer Lain-lain - Dana Bagi Hasil	150 Orang	Jumlah wadah daya pemenuhan layanan pemberdayaan perempuan kesetaraan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan	345.000.000
2.08.02.2.03.000.1	Kontribusi, Informasi dan Pemberdayaan Perempuan Kesetaraan Kabupaten/Kota	Perencanaan APT di Kota Dumai	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) Kabupaten/Kota	Terbentuknya kegiatan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) Kabupaten/Kota	Kota Dumai	20%	1 Dokumen	1 Lembaga	Dana Transfer Lain-lain - Dana Bagi Hasil	1 Dokumen	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) Kabupaten/Kota	172.500.000
2.08.03.2	PROGRAM PELINDUNGAN PEREMPUAN Pengabdian Masyarakat terhadap Perempuan Lingkap Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan APT di Kota Dumai			Kota Dumai				420.000.000 120.000.000			483.000.000 138.000.000

Kode	Grosses/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024			Pembinaan Bagi Kecamatan Tahun 2024		Kebutuhan Dana/ Pngk Indikatorif (Rp.)				
		Capaian Program	Indikator sub kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja					
						Program	Kebijakan sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tidak Ibar		Target			
2.08.03.2.01.000.1	Kondisi dan Stabilitas Pelaksanaan, Program dan Kegiatan Kecamatan terhadap Perencanaan Lengkapnya Kabupaten/Kota	Meningkatnya Partisipasi Bagi Perempuan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan koordinasi terhadap perencanaan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi terintegrasi terhadap program/lingkup daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	40%	1 Dokumen	3 Dokumen	60,000,000	Dana Transfer Umum - Desa (bagi hasil)	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan, program dan kegiatan koordinasi terhadap perencanaan kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	74,750,000
2.08.03.2.01.000.2	Achieves Kelengkapan dan Penguasaan Layanan Perencanaan Perencanaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Partisipasi Bagi Perempuan	Jumlah Peringkat Daerah Yang mampu melaksanakan koordinasi dan penyanggahan layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi terintegrasi terhadap program/lingkup daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	40%	7 Peringkat Daerah	3 Dokumen	55,000,000	Dana Transfer Umum - Desa (bagi hasil)	Jumlah Peringkat Daerah Yang Mampu melaksanakan koordinasi dan penyanggahan layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	7	Peringkat Daerah	63,250,000
2.08.03.2	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>								<b>105,000,000</b>					<b>120,750,000</b>
2.08.03.2.01.000.1	Penyediaan Layanan Pengabdian Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Partisipasi Bagi Perempuan	Jumlah Perencanaan Kerja/Program/Target Kabupaten/Kota yang menyediakan layanan pengabdian	Tersedianya layanan rujukan kegiatan bagi perempuan korban kekerasan yang membutuhkan koordinasi	Kota Dumai	40%	12 Orang	55 Layanan	55,000,000	Dana Transfer Umum - Desa (bagi hasil)	Jumlah Perencanaan Kerja/Program/Target Kabupaten/Kota yang menyediakan layanan pengabdian	12	Orang	63,250,000
2.08.03.2.01.000.2	Kondisi dan Stabilitas Pelaksanaan Pelayanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Partisipasi Bagi Perempuan	Jumlah Layanan Tingkat Lanjut Masyarakat yang Koordinasi dan Partisipasi Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan rujukan kegiatan bagi perempuan korban kekerasan yang membutuhkan koordinasi	Kota Dumai	40%	35 Layanan	55 Layanan	50,000,000	Dana Transfer Umum - Desa (bagi hasil)	Jumlah Layanan Tingkat Lanjut Masyarakat yang Koordinasi dan Partisipasi Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota	35	Layanan	57,500,000
2.08.03.2	<b>Pengastan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>190,000,000</b>					<b>224,250,000</b>

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Prestasi Mula Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Indikator sub kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Cobatan Peningkatan	Kebutuhan Dana/ Paga Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tidak Dihar	Target
2.08.03.2.03.0100.3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyelidik Layanan Penyelidikan Bagi Perancangan dan Pelaksanaan Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perilaku/tingkatnya Perencanaan	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyelidik Layanan Perancangan Bagi perencanaan Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang mendukung Peningkatan Kapasitas	Jumlah dokumen hasil pengisian dan penutupan kegiatan pelayanan perancangan pemerintahan tingkat kabupaten/kota	Kota Dumai	40%	1 orang	4 Dokumen	80,000,000	Dana Transfer Urusan - Dana Bagi Hasil	1 orang	92,000,000
2.08.03.2.03.0100.4	Penyediaan Substansi Spesifik bagi Perencanaan dan Dukung dan Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perilaku/tingkatnya Perencanaan	Jumlah perencanaan dalam aliansi daerah dan lembaga khusus kewenangan kabupaten/kota yang dapat mendukung pemerintahan kabupaten/kota (Crisis)	Jumlah dokumen hasil pengisian dan penutupan kegiatan pelayanan perancangan pemerintahan tingkat kabupaten/kota	Kota Dumai	40%	13 orang	4 Dokumen	45,000,000	Dana Transfer Urusan - Dana Bagi Hasil	13 orang	51,200,000
2.08.03.2.03.0100.4	Penyediaan Alur Kerja Layanan Penyelidikan Perencanaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perilaku/tingkatnya Perencanaan	Jumlah dokumen hasil pengisian dan penutupan kegiatan pelayanan perancangan pemerintahan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil pengisian dan penutupan kegiatan pelayanan perancangan pemerintahan kabupaten/kota	Kota Dumai	40%	2 Dokumen	4 Dokumen	70,000,000	Dana Transfer Urusan - Dana Bagi Hasil	2 Dokumen	80,200,000
2.08.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>											
2.08.04.3	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender (KIG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>											
2.08.04.3.01.000.3	Peningkatan Kegiatan Masyarakat untuk Standarisasi Keluarga Kawanan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas keluarga di Kota Dumai	Jumlah laporan pengabdian masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga dalam Kawanan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam Kawanan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	50%	1 Laporan	2 Dokumen	54,937,100	Dana Transfer Urusan - Dana Bagi Hasil	1 Laporan	63,200,665
2.08.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>											

		Rencana Tahun 2024										Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja		Peta Kerja (Rp.)		Sumber Dana		Otentas Penting		Pembinaan Majo Rencana Tahun 2025	
Kode	Uraian/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program		Indikator ach kegiatan		Isi/ Kegiatan		Lokasi Output Kegiatan		Program		Sub Kegiatan		Inisiatif Kegiatan		Peta Kerja (Rp.)	Sumber Dana	Otentas Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Paga Realistis (Rp.)		
		Program	Sub Kegiatan	Program	Sub Kegiatan	Program	Sub Kegiatan	Program	Sub Kegiatan	Program	Sub Kegiatan	Program	Sub Kegiatan	Program	Sub Kegiatan				Target				
2.06.05.2.01.0240	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Perkembangan Kota di Tingkat Daerah															201,000,000					331,150,000		
2.06.05.2.01.0240.1	Meningkatkan Pemahaman Data Gender dan Anak di Kecamatan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang Tersebut	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten Kota yang Tersebut	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan analisis data penyajian dan terdapat gender dan anak dalam perkembangan data di Kota Dumai	Kota Dumai	60%	3 Dokumen/5 Dokumen									100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Insig (Real)		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten Kota yang Tersebut		115,000,000		
2.06.05.2.01.0240.2	Meningkatkan Pemahaman Data Gender dan Anak dalam Perkembangan Kota di Kecamatan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Perencanaan Data Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Penyajian dan Perencanaan Data Gender dan Anak dalam Perkembangan Kota di Kecamatan Kabupaten / Kota	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan analisis data penyajian dan terdapat gender dan anak dalam perkembangan data di Kota Dumai	Kota Dumai	90%	3 Dokumen/5 Dokumen									101,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Insig (Real)		Jumlah Dokumen Penyajian dan Perencanaan Data Gender dan Anak dalam Perkembangan Kabupaten / Kota		116,150,000		
2.06.06	<b>PROGRAM PEMERINTAH HAK ANAK (PEHA)</b>															465,379,232					835,166,117		
2.06.06.2	<b>Penyusunan PIA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>															120,391,732					138,480,492		
2.06.06.2.01.0001	Meningkatkan Capaian Kota Layak Anak	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat subvensi kegiatan dan pendampingan	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat subvensi kegiatan dan pendampingan	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat subvensi kegiatan dan pendampingan	Kota Dumai	80%	12 Organisasi	100 Organisasi								60,392,900	Dana Transfer Umum - Dana Insig (Real)		Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat subvensi kegiatan dan pendampingan		69,451,803		

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prediksi Mula Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Indikator sub kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Kegiatan		Program	Target Capaian Kinerja		Pagu Kasja (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Ketertarikan Dinas/ Paga Indikatorif (Rp.)
								Kelompok Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tipe	Tipe	
2 08 06 2.01 000 3	Koordinasi dan Standarisasi Pelaksanaan Pelaksanaan Anak Kota Kota Layan Anak Kota	Meningkatnya Capaian Kota Layan Anak Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan standarisasi pelaksanaan anak kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan standarisasi pelaksanaan anak kota	Kota Dumai	80%	1 Dokumen	100 Organisasi	80,998,832	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 Dokumen	68,998,837		
2 08 06 2.01 000 3	Program dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kota	Meningkatnya Capaian Kota Layan Anak Kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan bantuan hidup anak	Jumlah dokumen hasil pengamatan dan pengumpulan data layanan bantuan hidup anak	Kota Dumai	80%	41 Kegiatan	5 Dokumen	94,992,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	30 Kegiatan	996,735,625		
2 08 06 2.01 000 3	Pengembangan dan Standarisasi Pelaksanaan Pelaksanaan Anak Kota Kota Layan Anak Kota	Meningkatnya Capaian Kota Layan Anak Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan standarisasi pelaksanaan anak kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan standarisasi pelaksanaan anak kota	Kota Dumai	80%	1 Dokumen	5 Dokumen	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 Dokumen	177,000,000		
2 08 06 2.01 000 4	Pengembangan dan Standarisasi Pelaksanaan Pelaksanaan Anak Kota Kota Layan Anak Kota	Meningkatnya Capaian Kota Layan Anak Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan standarisasi pelaksanaan anak kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan standarisasi pelaksanaan anak kota	Kota Dumai	80%	2 Dokumen	5 Dokumen	99,995,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2 Dokumen	111,994,250		
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KETERTAPAN ANAK								223.317.400			295.655.010		



Kode	Gruas/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Kecamatan Tahun 2024				Problema Majo Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Indikator sub kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Realje (Rp.)	Rencana Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja				
						Program	Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tetap Ekor	Target			
2.06.07.1	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Kondisi/lingkat Daerah								100,317,400						315,200,010	
2.06.07.1.01.000	Menyediakan Layanan Perawatan/ Pengobatan/ Pelayanan Kesehatan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Menyediakan Perawatan/ Pengobatan/ Pelayanan Kesehatan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan perawatan	Frekuensinya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Dumai	60%	50 Orang	7 Layanan	90,000,000	Dana Transfer Uraan - Dana Bagi Hasil				50 Orang	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan perawatan	100,500,000
2.06.07.1.02.000	4) Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Meningkatkan Perilaku/ Sikap Masyarakat	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Terdapatnya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Dumai	60%	10 Orang	7 Layanan	10,217,400	Dana Transfer Uraan - Dana Bagi Hasil				10 Orang	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	11,700,010
2.06.07.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								322,000,000							140,200,000
2.06.07.2.01.000	Program penerap/ pelatihan/ penyuluhan/ pelatihan/ pelatihan bagi AMPK (tingkat daerah kabupaten/kota)	Meningkatkan Perilaku/ Sikap Masyarakat	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Terdapatnya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Dumai	60%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	42,000,000	Dana Transfer Uraan - Dana Bagi Hasil				1 Kegiatan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan perawatan	31,750,000
2.06.07.2.02.000	Program penerap/ pelatihan/ penyuluhan/ pelatihan bagi AMPK (tingkat daerah kabupaten/kota)	Meningkatkan Perilaku/ Sikap Masyarakat	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Terdapatnya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Dumai	60%	10 Orang	10 Orang	37,000,000	Dana Transfer Uraan - Dana Bagi Hasil				20 Orang	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	42,000,000

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Kerangka Tahun: 2024				Pembinaan Monev Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Indikator sub kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokus Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Paga Hasil (Rp)	Bentuk Duan	Target Capaian Kinerja	
						Program	Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolak Ular	Target
2.08.01.2.03.0007	Pengembangan life (komunitas), informasi, dan edukasi) Meningkatkan Monev anak tingkat daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Perilaku orang tua dalam Anak	Jumlah EIE Perilaku orang tua anak	Terdapat laporan tanggapan yang konstruktif dari orang tua yang memantapkan perilaku orang tua dalam meningkatkan tingkat literasi dan keterampilan/kecak	Dua Daerah	01.000.000	Dua Transkrip Duan - Duan (Bogor dan)	01.000.000	1 Dokumen	1 Dokumen	46.000.000	
<b>TOTAL</b>						<b>9.074.753.854</b>					<b>9.283.966.967</b>	

Dumai, 10 Agustus 2023

KIPDA

MURNI ANNA, SKM, M.Si  
NIP. 19680529 198903 2 002

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA**  
**DUMAI TAHUN 2024**

Pada Bab IV ini akan disajikan rencana kerja program kegiatan dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2024 seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini:

**TABEL 4**  
**RENCANA KERJA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**TAHUN 2024**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN	BESARAN	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)
	Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					8,074,753,884
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Kota Dumai	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	100%	6,097,750,652
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	11 Dokumen	47,354,720
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	3 Dokumen	12,399,920
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	2 Dokumen	5,887,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	2 Dokumen	4,479,000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	2 Dokumen	4,028,800
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	2 Dokumen	3,008,800
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Dumai	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	4 Laporan	9,880,600
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	1 Laporan	7,670,600
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kota Dumai	<b>Persentase administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai</b>	<b>100%</b>	<b>4,330,873,296</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	32 Org/Bulan	4,332,873,296
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Dumai	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	2 Laporan	8,000,000
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Kota Dumai	<b>Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai</b>	<b>100%</b>	<b>8,000,000</b>
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	2 Laporan	8,000,000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kota Dumai	<b>Persentase administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai</b>	<b>100%</b>	<b>418,103,844</b>

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN	BESARAN	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	1 Paket	5,590,300
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	1 Paket	123,000,000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	1 Paket	25,000,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	3 Paket	36,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Dumai	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	3 Paket	34,999,798
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	1 dokumen	7,728,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	1 Laporan	163,785,746
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Persentase kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	<b>100%</b>	<b>320,762,600</b>
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai	Jumlah unit kendaraan dinas yang disediakan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	1 Unit	125,208,000
	Pengadaan Mebel	Kota Dumai	Jumlah paket mebel yang disediakan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	7 Unit	20,000,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	12 Unit	33,584,600
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	10 Unit	140,000,000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Tersedianya penunjang urusan pemerintah daerah</b>	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	<b>12 Bulan</b>	<b>847,459,674</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	1 Laporan	174,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	1 Laporan	110,450,000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	1 Laporan	9,835,674
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	1 Laporan	727,000,000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	<b>12 bulan</b>	<b>125,196,518</b>

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN	BESARAN	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	1 Unit	38,530,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	5 Unit	68,221,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	8 Unit	5,680,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Serana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara atau di rehabilitasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	8 Unit	6,033,518
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Serana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Serana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara atau di rehabilitasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	12 unit	6,710,000
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Persentase ARG di Kota Dumai</b>	<b>Masyarakat dan Perangkat Daerah</b>	<b>18%</b>	<b>613,449,500</b>
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	persentase kelembagaan pengarusutamaan (PUG) di Kelurahan	Masyarakat dan Perangkat Daerah	50%	304,887,300
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat	1 Dokumen	89,930,600
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Dumai	Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	1 Dokumen	65,000,000
	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	37 Perangkat Daerah	49,956,700
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Terlaksananya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	Masyarakat, Organisasi Perempuan	7 kecamatan	108,562,200
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Dumai	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik sosial dan ekonomi kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat, Organisasi Perempuan	1 Dokumen	105,000,000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Dumai	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat, Organisasi Perempuan	1 Dokumen	3,562,200

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN	BESARAN	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kota Dumai	Terlaksananya penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Masyarakat, Organisasi Perempuan	1 Kegiatan	300,000,000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Masyarakat, Organisasi Perempuan	25 Orang	150,000,000
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah dokumen dokumentasi informasi dan edukasi (KIE)	Masyarakat, Organisasi Perempuan	3 Dokumen	150,000,000
<b>3</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Kota Dumai	<b>Meningkatnya perlindungan bagi perempuan</b>	<b>Masyarakat</b>	<b>30%</b>	<b>420,000,000</b>
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Dumai	Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Masyarakat	7 Kecamatan	120,000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat	1 Dokumen	65,000,000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah Yang mendapatkan Advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Masyarakat	7 Perangkat Daerah	55,000,000
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kota Dumai	<b>Tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus</b>	<b>Masyarakat</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>105,000,000</b>
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan	Masyarakat	30 Orang	55,000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Layanan)	Masyarakat	55 Layanan	50,000,000
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Dumai	<b>terselenggaranya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan</b>	<b>Masyarakat</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>195,000,000</b>
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penangan Bagi perempuan Korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang mendapat Peningkatan Kapasitas	Masyarakat	25 Orang	80,000,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN	BESARAN	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Dumai	Jumlah perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten/kota yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan spesifik (Orang)	Masyarakat	30 Orang	43.000,000
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga pelayanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat	1 Dokumen	70.000,000
4	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga</b>	<b>Masyarakat</b>	<b>80%</b>	<b>54,957,100</b>
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Terlaksananya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	Masyarakat	7 Kecamatan	54,957,100
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah laporan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	Masyarakat	1 Laporan	54,957,100
5	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Meningkatnya pemanfaatan data terpilah gender dan anak</b>	<b>Masyarakat</b>	<b>35%</b>	<b>201,000,000</b>
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Terlaksananya pengumpulan pengolahan analisis dan tersedianya data gender dan anak di Kota Dumai	Masyarakat	2 Dokumen	201,000,000
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten Kota yang Tersedia	Masyarakat	3 Dokumen	100,000,000
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten / Kota	Masyarakat	2 Dokumen	101,000,000
6	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Meningkatnya capaian Kota Layak Anak</b>	<b>Masyarakat, Organisasi</b>	<b>75%</b>	<b>465,379,232</b>
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang berperan dalam pemenuhan hak anak	Masyarakat, Organisasi	92 Organisasi	120,391,732
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	Masyarakat, Organisasi	92 Organisasi	60,392,900
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat, Organisasi	2 Dokumen	59,998,832
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Masyarakat	25 Lembaga	344,987,500



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN	BESARAN	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah anak yang mendapatkan layanan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat	15 Laporan	94,992,500
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat	1 Dokumen	150,000,000
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Terselenggaranya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat	2 Dokumen	99,995,000
<b>7</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Meningkatnya perlindungan khusus anak</b>	<b>Masyarakat</b>	<b>50%</b>	<b>222,217,400</b>
	Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Dumai	Tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Masyarakat	7 Layanan	100,217,400
	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Dumai	Jumlah AMPK yang mendapat layanan pengaduan	Masyarakat	50 Orang	90,000,000
	Koordinasi Pelaksanaan layanan AMPK	Kota Dumai	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Masyarakat	10 Orang	10,217,400
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Dumai	Jumlah dokumen hasil penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Masyarakat	7 Dokumen	122,000,000
	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Dumai	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Masyarakat	1 Kegiatan	45,000,000
	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Dumai	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlibat dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Masyarakat	25 Orang	37,000,000
	Pengembangan KIE [komunikasi, informasi, dan edukasi] perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Dumai	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Masyarakat	1 Dokumen	40,000,000
<b>TOTAL</b>						<b>8,074,753,884</b>

Dumai, 10 Agustus 2023  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK



**MARNI ASNA, SKM, M. SI**  
NIP. 19780529 198903 2 002

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN**

Pelaksanaan program kegiatan tahun 2022 dengan total anggaran sebesar Rp. 6.832.285.231,- telah terealisasi sebesar Rp. 6.501.899.676,- atau 95.16% yang terdiri dari :

- a. Program Non Urusan meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan realisasi 95.80%
- b. Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi :
  - 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan realisasi 97.57%
  - 2) Program Perlindungan Perempuan dengan realisasi 84.12%
  - 3) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan realisasi 98.06%
  - 4) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan realisasi 97.31%
  - 5) Program Perlindungan Khusus Anak dengan realisasi 96.61%

Melihat capaian kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan program kegiatan tahun 2022 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai telah mencapai target, namun jika dilihat dari persentase masing-masing program masih terdapat salah satu program yang capaian kinerjanya masih di bawah 85% yaitu Program Perlindungan Perempuan dengan realisasi 84.12%. Hal ini disebabkan karena rendahnya kasus rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan pada sub kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/ kota dengan realisasi 80.34% sehingga berpengaruh pada capaian program tersebut.

## **5.2 KAJIDAH-KAJIDAH PELAKSANAAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT.**

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Menjaga sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di RPJMD dan Renstra DPPPA Kota Dumai.
- b. Sebagai pedoman dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) ini disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah
- c. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, DPPPA Kota Dumai berkewajiban untuk melaksanakan program - program Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2024 ini dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.

## **5.3 RENCANA TINDAK LANJUT**

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2024, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen rincian belanja sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.